



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI KINERJA BAPPEDA KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR PADA PROSES PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**



TAPM diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam
Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

**F I H A S R I N
NIM. 016124657**

**Program Pascasarjana
Universitas Terbuka
2013**

ABSTRAK**EVALUASI KINERJA BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH****FIHASRIN**

Universitas Terbuka

fihasrinut@gmail.com

Kata Kunci : Kinerja

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif positivis. Penentuan narasumber dan informan ini dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih narasumber yang paling berkompeten memberikan informasi dan data yang diperlukan yaitu beberapa pejabat dan pegawai di lingkungan BAPPEDA dan DPRD yang terkait dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara interview dan observasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BAPPEDA dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir diukur dari indikator responsivitas termasuk rendah, dari indikator responsibilitas termasuk cukup baik dan indikator akuntabilitas diukur masih rendah. Kurang konsisten dan konsekuennya aparat dalam menggunakan produk hasil proses tahapan sebelumnya, mengakibatkan penyusunan program atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan belum maksimal. Untuk itu rekomendasi yang bisa diberikan adalah BAPPEDA melakukan pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan strategi dan fungsi organisasi serta strategi peningkatan partisipasi dari masyarakat.

ABSTRACT**PERFORMANCE EVALUATION OF THE BAPPEDA DISTRICT IN
PROCESS WORK PLAN INDRAGIRI HILIR REGIONAL
DEVELOPMENT****FIHASRIN**

Universitas Terbuka

fihasrinut@gmail.com

Keywords: Performance

This study aims to evaluate the performance of BAPPEDA Indragiri Hilir in the Preparation of Regional Development Plan in Indragiri Hilir. The study design used is descriptive research method, qualitative positivist approach. Determination of informants was done purposively, ie selecting the most competent speakers provide the necessary information and data that some officers and staff of the Planning, and Parliament involved in the preparation of the Local Development Plan. Data was collected by way of interviews and observations were then analyzed descriptively. The results showed that performance in the Process BAPPEDA Regional Development Plan, it can be concluded that the performance BAPPEDA Indragiri Hilir in the Preparation of Regional Development Plan in Indragiri Hilir measured by indicators including low responsiveness, of fairly good indicators including responsibility and accountability indicator is measured low. Apparatus and consequently, less consistent in using the products of the previous stage, resulting in the preparation of the program or activity in accordance with development needs a coordinated, focused and sustained is not maximized. To the recommendation that can be given is BAPPEDA conduct human resource development, improvement and strategy of the organization and function of public participation strategy.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Pada Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Penyusun TAPM : FIHASRIN

NIM : 016124657

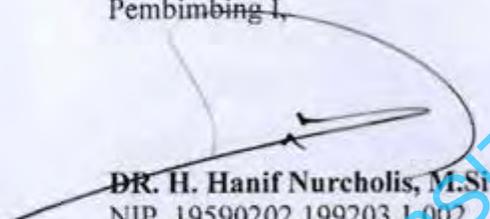
Program Studi : Magister Administrasi Publik.

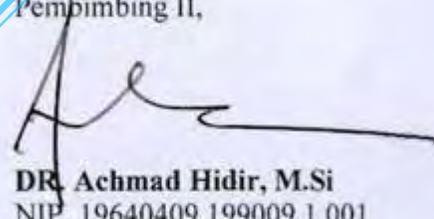
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


DR. H. Hanif Nurcholis, M.Si
 NIP. 19590202 199203 1 002


DR. Achmad Hidir, M.Si
 NIP. 19640409 199009 1 001

Mengetahui :

Ketua Bidang ISIP,

Direktur Program Pasca Sarjana.


Florentina Ratih Wulandari, S.Ip, M.Si
 NIP. 19710609 199802 2 001


Suciati, M.Sc, Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA (PPs-UT)
 Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

PENGESAHAN

Nama : FIHASRIN
 NIM : 016124657
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul Tesis : Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
 Pada Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/tanggal : Sabtu / 15 Juni 2013.
 Waktu : 15.45 WIB – 17.45 WIB.

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Drs. Elfis Suanto, M.Si

Penguji Ahli : Prof. Eko Prasajo, SIP, Mag.rer.publ. DR.rer.publ.

Pembimbing I : DR. H. Hanif Nurcholis, M.Si

Pembimbing II : DR. Achmad Hidir, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA (PPs-UT)
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Kepada :

Yth. Direktur Program Pascasarjana UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan 15418

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari mahasiswa ;

Nama / NIM : FIHASRIN / 016124657.

Program Studi : Magister Administrasi Publik.

Judul TAPM : Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Pada
Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru* selesai sekitar 80% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji* dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Jakarta, 03 Juli 2013.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. H. Hanif Nurcholis, M.Si
NIP. 19590202 199203 1 002

DR. Achmad Hidir, M.Si
NIP. 19640409 199009 1 001

*) Coret yang tidak perlu.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "EVALUASI KINERJA BAPPEDA KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR PADA PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh yang
dikutip maupun diruju telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
Menerima sanksi akademik

Tembilahan, 03 Juli 2013.

Yang menyatakan,

FIHASRIN
NIM. 016124657

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan Penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Pekanbaru selaku Penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Bapak DR. H. HANIF NURCHOLIS, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak DR. ACHMAD HIDIR selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.
4. Ibu FLORENTINA RATIH WULANDARI, S.Ip, M.Si, Ketua Bidang ISIP selaku penanggung jawab Program Studi Magister Administrasi Publik,
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral.
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tembilahan, 03 Juli 2013.
Penulis,

FIHASRIN

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan TAPM	iv
Lembar Pengesahan	v
Surat Pernyataan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Indikator Kinerja.....	11
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi	18
D. Perencanaan Pembangunan	25
E. Proses Perencanaan.....	29
F. Proses Perencanaan konvensional dan Inkonvensional	30
G. Evaluasi Kinerja.....	35
H. Kerangka Berpikir.....	38
I. Hipotesis Kerja	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Desain Penelitian	40
B. Narasumber dan Informan.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Pengolahan Data dan Analisis	43
E. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Kinerja Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.....	51
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	87
1. Faktor Internal.....	88
2. Faktor Eksternal.....	92
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Perbedaan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2010.....	2
Tabel 1.2	: Inkonsistensi Antara RKPD Dengan KUA/PPAS Maupun Dengan RAPBD.....	3
Tabel 4.1	: Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Posisi Per Desember 2010)	108
Tabel 4.2	: Komposisi PNS Menurut Pangkat/Golongan Ruang (Kondisi Desember 2010).....	109
Tabel 4.3	: Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda (Kondisi Desember 2010).....	110
Tabel 4.4	: Kinerja BAPPEDA Pada Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir.....	114
Tabel 4.5	: Analisis Kinerja BAPPEDA Pada Tahap Persiapan Dan Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan.....	118
Tabel 4.6	: Analisis Kinerja BAPPEDA Pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD	123
Tabel 4.7	: Analisis Kinerja BAPPEDA Pada Tahap Penyusunan Rancangan RENJA SKPD.....	125
Tabel 4.8	: Analisis Kinerja BAPPEDA Pada Tahap Penyusunan Rancangan RKPD.....	127
Tabel 4.9	: Analisis Kinerja BAPPEDA Pada Tahap MUSRENBANG	128
Tabel 4.10	: Analisis Kinerja BAPPEDA Pada Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.....	133

Tabel 4.11	: Analisis Kinerja BAPPEDA Pada Tahap Penyusunan RENJA SKPD.....	134
Tabel 4.12	: Analisis Kinerja BAPPEDA Pada Tahap Penyiapan Dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tentang RKPD Dan Peraturan Kepala SKPD Tentang RENJA SKPD.....	135
Tabel 4.13	: Analisis Kinerja BAPPEDA Pada Tahap Pengintegrasian RKPD Ke Dalam Proses Penganggaran Daerah.....	136
Tabel 4.14	: Hasil Wawancara dengan Responden.....	138

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kegiatan Pokok Perencanaan	30
Gambar 2.2 : Proses Perencanaan Konvensional	31
Gambar 2.3 : Proses Perencanaan Inkonvensional.....	31
Gambar 2.4 : Teknis Proses Perencanaan.....	35
Gambar 3.1 : Penentuan Narasumber	42

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sejak keluarnya Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. Argumentasi yang semula berkembang tentang tidak perlunya pembangunan diatur melalui sistem perencanaan dalam era otonomi daerah, otomatis sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan bila hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku pembangunan, dibentuk suatu institusi perencanaan pembangunan daerah yaitu BAPPEDA. Pembangunan yang terencana dan terkoordinasi dapat terwujud dengan baik apabila lembaga-lembaga di daerah saling berkoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, dengan demikian fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai koordinator sangatlah menentukan.

Berkenaan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh BAPPEDA setiap tahun, merupakan fungsi-fungsi yang sangat penting dalam manajemen pembangunan.

Dengan demikian peran BAPPEDA adalah sangat menentukan guna menjadi koordinator dalam perencanaan dan pembangunan di daerah, sehingga keberhasilan suatu daerah akan banyak ditentukan oleh kinerja BAPPEDA dalam menjalankan tugasnya.

BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan fungsinya dalam penyusunan program-program tahunan yang berkesinambungan dan terkoordinasi masih dirasakan kurang optimal, indikasinya dapat dilihat antara lain :

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, mulai dari Penyusunan Rancangan RKPD sampai dengan Penetapan RKPD tidak tepat waktu.
2. Adanya perbedaan asumsi Ekonomi Makro Tahun 2010, hal ini dapat dilihat pada :

Tabel 1.1. Perbedaan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2010

Indikator	RKPD	KUA
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	7,76 %	7,54 %
Laju Inflasi	6,00 %	5 %

Sumber : Tim Evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota Prov. Riau.

3. Inkonsistensi antara RKPD dengan KUA/PPAS maupun dengan RAPBD, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Inkonsistensi antara RKPD dengan KUA/PPAS
Maupun dengan RAPBD**

SKPD/Program/Kegiatan	RKPD	PPAS	RAPBD
1	2	3	4
DINAS KESEHATAN			
1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Rp.150.000.000,00	Rp.229.186.000,00	Rp.229.186.000,00
2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Rp.192.000.000,00	Rp.562.200.000,00	Rp.562.200.000,00
BAPPEDA			
1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Rp.200.000.000,00	Rp.250.001.450,00	Rp.250.001.450,00
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Rp.250.000.000,00	Rp.345.028.800,00	Rp.345.028.800,00
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp.75.000.000,00	Rp.90.280.000,00	Rp.90.280.000,00
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Rp.0,00	Rp.255.244.750,00	Rp.255.244.750,00
SEKRETARIAT DPRD			
1. Kegiatan Reses	Rp.2.592.485.000,00	Rp.3.214.420.560,00	Rp.3.214.420.560,00

1	2	3	4
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.165.000.000,00	Rp.235.024.500,00	Rp.235.024.500,00
3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.1.090.664.000,00	Rp.1.303.190.000,00	Rp.1.303.190.000,00

Sumber : Tim Evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota Prov. Riau.

Bertolak dari uraian diatas yang menggambarkan belum optimalnya BAPPEDA menjalankan fungsinya sebagai koordinator Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka dalam era otonomi daerah ini BAPPEDA sebagai perangkat daerah kinerjanya dituntut tinggi, hal ini sebagai konsekuensi otonomi daerah itu sendiri.

Dari pengamatan fenomena tersebut di atas tergambar bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir belum terkoordinasi dengan optimal, maka sangatlah menarik untuk mengkaji kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Perumusan Masalah.

Dari uraian di atas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir kurang optimal. Untuk itu dibuat pertanyaan penelitian, "Bagaimana kinerja

dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir?"

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk menyumbang dan memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan di Bidang Administrasi Publik, khususnya yang terkait dengan konsep teoritis kinerja organisasi publik.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang berkaitan dengan tahapan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir sehingga berguna sebagai bahan masukan pimpinan dalam mengambil kebijakan-kebijakan.

b. Bagi Akademisi.

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan kemampuan dalam membahas kinerja suatu organisasi publik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para civitas akademika khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kinerja.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Yaser Arafat (2002) meneliti tentang Evaluasi Kinerja BAPPEDA Kabupaten Barito Utara pada Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap yang sangat menentukan dalam proses perencanaan tahunan adalah tahap perumusan usulan program/proyek secara terpadu. Hal ini terlihat pada tahap evaluasi dan analisa keadaan dan tahap penyusunan rencana umum pembangunan tahunan daerah yang menunjukkan kinerja kualitas pelayanan dan responsibilitas yang baik, tetapi karena kurang konsisten dan konsekuen dalam menggunakan produk hasil proses dua tahap sebelumnya, mengakibatkan dalam penyusunan program/proyek sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan belum maksimal.

Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah dengan menggunakan landasan normatif yaitu Permendagri No.9 Tahun 1982, ini ditekankan kepada proses perencanaan yang melalui tiga tahap yaitu tahap evaluasi dan analisa keadaan, tahap penyusunan rencana umum pembangunan tahunan daerah dan tahap perumusan usulan program/proyek secara terpadu.

Saiful (2011), meneliti tentang Proses Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Birem Bayeun pada Bappeda Aceh Timur, dalam penelitiannya melakukan analisa proses partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan dan mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten yang diselenggarakan dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah terfokus pada proses Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang alur prosesnya dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten

Samsul Rizal (2011), meneliti tentang Partisipasi Publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan berdasarkan data deskriptif, yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, serta dokumen dan peraturan pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ; (1) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan secara formalitas, mengingat banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai mekanisme musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara berada pada tahap konsultasi dan tingkat kehadiran masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan kehadiran aparat pemerintah kabupaten. (2) Hambatan utama partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara adalah durasi waktu pelaksanaan yang sangat singkat dan akses informasi perencanaan dan penganggaran yang kurang transparan. (3) Usulan masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara belum konsisten, mengingat minimnya usulan masyarakat basil

musrenbang mulai dari tingkat gampong sampai kecamatan yang diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara.

Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah menitikberatkan pada pelaksanaan Musrenbang kabupaten, tingkat partisipasi masyarakat, dan konsistensi usulan masyarakat sebagai variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen Peraturan Menteri Dalam Negeri, model anak tangga partisipasi masyarakat, serta dokumen hasil musrenbang.

Efendi, Ahmad (2011), meneliti tentang Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada BAPPEDA Kota Semarang), dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang berjumlah 69 pegawai yang berstatus PNS. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus sampling, dimana seluruh populasi yang ada digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Variabel lingkungan kerja (X) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) di Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Semarang. Variabel motivasi kerja (X 1) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) di Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Semarang, Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ditemukan Adjust R Squer sebesar 69.3% artinya bahwa variable kinerja pegawai di Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Semarang, dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja dan motivasi kerja,

sedangkan sisanya sebesar 30.7% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini.

Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah melihat sejauhmana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai.

Syaifullah (2008), meneliti tentang Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (studi kasus perencanaan pembangunan tahun 2007), penelitian ini menemukan bahwa partisipasi dalam perencanaan pembangunan masih dalam tahap tokenisme dan representatif-elitis, kemitraan antara masyarakat dengan birokrasi dan pejabat politik masih bersifat subordinate union of partnership, dialog yang diadakan masih bersifat semu dan pengambilan keputusan tidak dilakukan secara bargaining di antara para aktor. Kualitas perencanaan masih buruk karena belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, kurang mempunyai alur perencanaan pembangunan yang jelas serta kurang ada keterkaitan substansi antar dokumen yang satu dengan yang lainnya.

Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah pada pendeskripsian partisipasi stakeholders dalam perencanaan pembangunan dan untuk mendeskripsikan kualitas perencanaan pembangunan.

Askuri (2002), meneliti tentang Analisis Kinerja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat hubungan antara motivasi kerja (X_1) terhadap kinerja pegawai (Y), terdapat hubungan antara kemampuan kerja (X_2) terhadap kinerja pegawai (Y), terdapat hubungan antara disiplin

kerja (X_3) terhadap kinerja pegawai (Y), tidak terdapat hubungan antara motivasi kerja (X_1), kemampuan kerja (X_2) dan disiplin kerja (X_3) terhadap kinerja pegawai (Y). Motivasi yang kuat dalam bekerja sangat perlu ditingkatkan maka secara periodik hendaknya diadakan pertemuan-pertemuan untuk meningkatkan motivasi pegawai di segala jenjang. Kemampuan kerja dari para pegawai perlu ditingkatkan agar tidak tertinggal dengan kemajuan zaman diantaranya dengan cara mempermudah persyaratan bagi yang hendak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan mengadakan training keterampilan secara periodik. Hendaknya pimpinan meningkatkan disiplin kerja yang tinggi dengan cara memberikan keteladanan dalam berbagai permasalahan kerja sehingga pegawai akan terpadu untuk lebih disiplin.

Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah menitikberatkan pada hubungan faktor motivasi kerja, kemampuan kerja dan disiplin kerja pegawai terhadap kinerja pegawai dan pengujian hipotesis dengan menggunakan koefisien korelasi kendall dan koefisien konkordansi kendall.

B. Indikator Kinerja.

McDonald dan Lawton dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) mengemukakan indikator kinerja antara lain : *output oriented measures throughput, efficiency, effectiveness.*

Selanjutnya indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

Salim dan Woodward dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) mengemukakan indikator kinerja antar lain : *economy*, *efficiency*, *effectiveness*, *equity*. Secara lebih lanjut, indikator tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. *Economy* atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
2. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
4. *Equity* atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan.

Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) mengemukakan indikator kinerja terdiri dari : *responsiveness*, *responsibility*, *accountability*.

1. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap *provider* terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan *customers*.

2. *Responsibility* atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stakeholders*, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi, yang terdiri atas beberapa faktor berikut :

1. *Tangibles* atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh *providers*.
2. *Reliability* atau keandalan adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. *Responsiveness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong *customers* dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
4. *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada *customers*.
5. *Emphaty* adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh *providers* kepada *customers*.

Sedangkan Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto (2006 : 52) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain :

1. Efisiensi.

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

2. Efektivitas.

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

3. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepastian. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

4. Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan public merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

1. Produktivitas.

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan.

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

3. Responsivitas.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas.

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas.

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi

publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari berbagai macam indikator pengukuran kinerja yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006). Penulis memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006 : 50) meliputi lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Dari kelima indikator diatas peneliti memilih untuk menggunakan tiga indikator saja yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Ketiga indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-indikator ini dirasa telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi publik dari dalam dan luar organisasi.

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) konsep responsivitas merupakan indikator kinerja yang berorientasi pada proses. Responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Responsibilitas, Agus Dwiyanto (2006 : 57) menjelaskan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Mengenai akuntabilitas, Agus Dwiyanto (2006 : 57) mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Acuan pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik juga dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik.

Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh suatu organisasi publik adalah dapat merefleksikan pola pelayanan yang dipergunakan yaitu pola pelayanan yang akuntabel yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi.

Organisasi merupakan suatu sistem yang dinamis dari interaksi antara manusia dan sumber-sumber yang disatukan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Menurut William G.Scot (1976), organisasi adalah suatu sistem mengenai aktivitas yang dikoordinasikan ke arah satu tujuan bersama di bawah wewenang dan kepemimpinan seseorang. Demikian pula, Chester A. Bernard (Thoha, 1993) menjelaskan bahwa organisasi sebagai suatu sistem aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atas ketentuan-

ketentuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pengertian organisasi adalah himpunan orang-orang yang berinteraksi untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu dengan dukungan sumber-sumber daya serta berhadapan dengan kendala-kendala dalam lingkungannya maupun dari luar lingkungannya guna mencapai tujuan bersama. Dengan demikian pengertian organisasi mengandung dua unsur tujuan, sumber daya, kendala dan lingkungan dalam arti bahwa terkandung unsur internal organisasi dan eksternal organisasi.

Dalam pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keseluruhan yang mencakup segi internal dan eksternal organisasi yang oleh Steers (1985), mengatakan pengaruh lingkungan internal yaitu menciptakan milieukultur dan sosial tempat berlangsungnya ke arah tujuan atau iklim organisasi, dan gambaran perubahan yang terjadi pada internal organisasi misalnya perubahan tujuan organisasi tersebut, dan pengaruh lingkungan eksternal yaitu perubahan yang terjadi di luar organisasi misalnya perubahan struktur masyarakat, perubahan kondisi ekonomi, situasi politik atau semakin besarnya tuntutan yang ditujukan pada organisasi dari masyarakat, lembaga atau institusi lain di luar organisasi tersebut.

George Homans (Arie 1985), menyatakan bahwa organisasi terdiri dari sistem lingkungan luar (*external environment*) dan sistem lingkungan dalam (*internal environment*), yang melingkupi organisasi di maksud dalam menciptakan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Dengan

demikian faktor eksternal dan faktor internal mempunyai keterkaitan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lebih jauh lagi Steers (1985), menyatakan bahwa di dalam pencapaian tujuan organisasi keberhasilan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yaitu : (1) Keterdugaan keadaan lingkungan; (2) Ketepatan persepsi terhadap keadaan lingkungan, dan (3) Pengertian rasionalitas dan tindakan organisasi.

Dari pernyataan tersebut bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi keadaan lingkungan sangat erat hubungannya dengan kemampuan organisasi, sejauhmana organisasi menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya dalam mencapai keberhasilan dalam hal ini semakin besar kepastian organisasi akan keberadaan lingkungannya akan semakin besar pula peluang organisasi melakukan kesesuaian atau keterdugaan keadaan.lingkungan maka makin besar pula potensi organisasi untuk memberikan tanggapan yang tepat.

Ketepatan persepsi terhadap keadaan organisasi adalah sebagai suatu isyarat yang akan dipilih dalam pengambilan keputusan oleh organisasi yang dilakukan bersama-sama antara pemimpin organisasi dan para anggotanya, hal ini memberikan suatu pandangan dan cara berpikir dari suatu kelompok organisasi dengan tujuan menghindari konflik antar sesama guna pencapaian tujuan organisasi. Rasionalitas dalam pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam organisasi walaupun kejadian-kejadian dilingkungannya sudah dapat diduga serta bagaimana untuk bertindak dan menanggapi perubahan dalam lingkungannya.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan atau kinerja suatu organisasi di mana faktor internal dan faktor eksternal adalah

sangat penting artinya dalam menentukan setiap gerak dan dinamika organisasi.

Keberhasilan suatu lembaga yang inovatif dalam melakukan perubahan sosial apabila lembaga tersebut mempunyai kapasitas administrasi yang memadai ditunjang lingkungan yang mendukung perubahan sosial di maksud. Dengan demikian kapasitas administrasi yang memadai dalam setiap lembaga atau organisasi yang dalam hal ini termasuk institusi BAPPEDA, merupakan suatu keharusan manakala mengharapkan suatu keberhasilan sebagaimana ditetapkan dalam tujuan organisasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Effendi, dkk (1992), rendahnya prestasi BAPPEDA disebabkan karena kapasitas administrasi yang rendah dari lembaga perencanaan. Demikian pula para pengamat perencanaan pada umumnya menyatakan bahwa kegagalan perencanaan pembangunan di negara berkembang disebabkan kurangnya kapasitas administrasi. Kapasitas administrasi merupakan titik lemah dalam proses perencanaan pembangunan, maka peningkatan kapasitas administratif, baik berupa peningkatan profesionalisme, disiplin kerja, maupun penataan struktur organisasi perlu mendapat prioritas.

Mustodidjaja (Effendi, dkk, 1992), menyatakan bahwa untuk melakukan peningkatan kapaitas administrasi pada suatu lembaga maka diperlukan suatu transformasi administrasi yang mencakup aspek-aspek kelembagaan, organisasi kepegawaian, manajemen serta sarana administrasi.

Untuk melakukan perubahan atau peningkatan kinerja suatu lembaga tidaklah cukup manakala hanya memperhatikan keberhasilan dalam mencapai

misi dan tujuan organisasi atau lembaga. Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya dan Hilliry (1994), mengaitkan peran faktor eksternal organisasi terhadap internal yaitu dalam melaksanakan tugasnya seorang petugas pemerintah perlu sekali memperhatikan batas-bata objektif maupun subjektif yang diberikan oleh lingkungan maupun fasilitas dan kemampuan diri.

Para petugas perlu menjalankan adaptasi lingkungan mengetahui dan meyakini tujuan pembangunan, mengelola pola sosial budaya setempat maupun pola budaya pribadi. Selain itu bagaimana mengintegrasikan langkah-langkah serta kegiatan sendiri dengan kegiatan dan tujuan lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung serta kegiatan dan tujuan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal dalam arti pengaruh lingkungan terhadap kegiatan suatu organisasi Bryant and White (1989), mengemukakan dua alasan yang menyebabkan lingkungan menjadi penting untuk sebuah organisasi karena yaitu : pertama, lingkungan dapat menyediakan sumber-sumber daya dan kedua, lingkungan menawarkan batas dan kendala. Dengan demikian suatu organisasi perlu menghimpun sebanyak mungkin sumberdaya serta perlu melindungi diri terhadap tindakan-tindakan serta ancaman pihak lain. Selain itu organisasi semaksimal mungkin dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dan bagaimana secara efektif mengatasi kendala-kendala baik dari dalam lingkungan organisasi maupun dari luar organisasi.

Kesimpulan dari beberapa teori yang diuraikan di atas bahwa kemampuan kerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor bersifat

internal dalam arti menyangkut lembaga itu sendiri dan faktor bersifat eksternal menyangkut keterkaitan dengan lembaga lain diluarnya termasuk potensi fisik, ekonomi, sosial politik dan budaya yang ada di daerah setempat.

Menurut Siagian (2000) yang menyatakan mekanisme prosedur kerja berkait erat dengan pengelolaan organisasi, perlu ditekankan kepada : a) Secara eskplisit kejelasan mekanisme dan prosedur kerja juga mengandung kesederhanaan baik dalam perumusannya maupun materinya, b) Mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang akan menggunakan dan menjadi objeknya, c) Perlu konsistensi dalam penerapannya, d) Ketaatan penuh semua pihak diperlukan, dan d) Kejelasan sanksi disiplin bagi yang melanggarnya.

Menurut Eko Budihardjo (1995) salah satu kendala Pemerintah daerah sekarang ini adalah kelebihan pegawai dengan kualitas yang kurang cocok dengan pekerjaan yang ada (*overstaffed management*), tetapi sekaligus juga kekurangan pegawai yang ahli dan terampil sesuai dengan bidang pekerjaannya (*understaffed management*).

Demikian program kerja organisasi hendaknya dapat menciptakan koordinasi yang baik di antara unit-unit dalam organisasi untuk menumbuhkan suasana kerja yang dinamis dan kondusif, serta terhindarkan dari tumpang tindih tugas-tugas di antara masing-masing unit organisasi. Kewenangan informal yang merupakan kewenangan yang ada pada setiap aparat yang menduduki jenjang jabatan akan tetapi tidak diatur dalam uraian tugas dan jabatan masing-masing namun demikian sifatnya untuk kelancaran

pelaksanaan tugas-tugasnya dan seyogyanya tidak menyimpang dari kewenangan formal yang telah ditetapkan.

Sarana dan prasarana adalah sumber daya pendukung kegiatan organisasi berupa dana atau fasilitas-fasilitas lainnya yang dimiliki oleh organisasi maupun di luar kekuasaan organisasi. Sumber daya tersebut adalah berupa dana dan fasilitas-fasilitas seperti gedung, sarana perkantoran, kendaraan dan lain-lain yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten, serta fasilitas lainnya yang tidak di bawah kekuasaan organisasi yang sifatnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya seperti ; fasilitas transportasi, komunikasi dan lain-lain.

Dukungan SKPD dan masyarakat adalah seberapa besar peranan dari pada lembaga lainnya untuk dapat bekerja sama dan menyelaraskan serta menyasikan kepentingan organisasi maupun kepentingan dari pada lembaga lain tersebut atau masyarakat.

Dukungan lembaga legislatif dalam hal ini DPRD sangat besar peranannya dengan keberhasilan organisasi seperti BAPPEDA, apabila dikaitkan hubungannya dengan keberadaan BAPPEDA Kabupaten sebagai suatu organisasi yang inovatif menggerakkan perubahan sosial tidak mungkin bergerak sendiri, oleh karenanya harus menciptakan hubungan (*linkages*) dengan lingkungannya yang sama-sama saling mempengaruhi dan sifatnya menolak atau mendukung.

Eko Budihardjo (1995) menggambarkan, meskipun sudah diupayakan untuk lebih menggalakkan adanya usulan-usulan yang datang dari masyarakat, namun kurangnya kemampuan untuk merumuskannya secara teknis, usulan-

usulan tersebut lebih mirip daftar pembelian barang (*shopping list*). Akibatnya sangat kecil kemungkinan usulan tersebut diterima oleh birokrasi di atasnya. Padahal tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan rakyat.

Pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung kepada anggaran dana pembangunan. Hal ini disebabkan karena pembangunan di Indonesia masih berorientasi pada anggaran yang ada (*budget oriented*) bukan (*program oriented*). Menurut Idrus dkk (1999) salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah usulan program/proyek yang menyesuaikan dana buka dana yang menyesuaikan dengan usulan program/proyek.

D. Perencanaan Pembangunan.

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian pembangunan menurut Siagian adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 4) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk

mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1981: 3) bahwa planning atau perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

Menurut Diana Conyers (1994: 5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi

dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asasprioritas.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi

bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia telah diterapkan secara luas mulai pertengahan tahun 1980-an. Mekanisme perencanaan tersebut menggunakan kombinasi antara pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) dan dari atas (*top down approach*). Terdapat enam tahap yang dilalui, mulai dari musyawarah pembangunan desa (musbangdes), Diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) di tingkat Kabupaten/Kota, Rakorbang tingkat Provinsi, Konsultasi Regional Pembangunan (KONREGBANG), dan Konsultasi Nasional Pembangunan (KONASBANG).

Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi pengelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Oleh karena itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal. Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan top down ke pembangunan partisipatif.

Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunanyang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

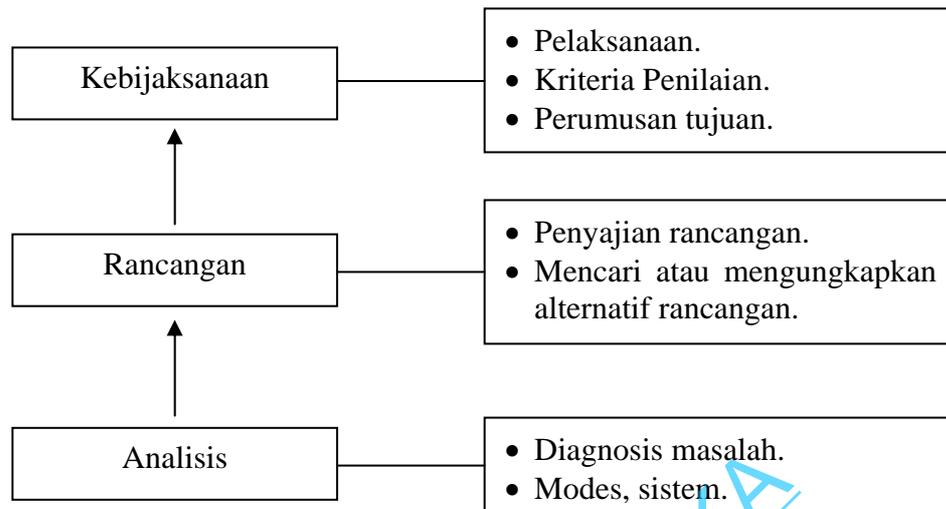
E. Proses Perencanaan.

Wilson (dalam Warpani, 1984) membagi proses perencanaan dalam tiga kegiatan, yaitu : penyusunan kebijaksanaan, rancangan dan analisis.

Perencana perlu memiliki kemampuan menganalisa agar mampu menemukan persoalan dan meramalkan pengaruh perencanaannya. Penentu kebijaksanaan perlu memiliki kemampuan merancang dengan baik untuk menjamin agar ia mempunyai pandangan yang luas atas alternatif rencana yang dihadapinya, dan juga memiliki kemampuan menganalisis guna membantu mengembangkan criteria penilaian dalam menentukan pilihan atas alternatif.

Penjabaran ketiga kegiatan pokok tersebut di atas dinyatakan dalam Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1. Kegiatan Pokok Perencanaan



Sumber : Wilson dan Warpani, 1987.

Proses perencanaan yang lengkap selalu akan melalui tahap analisis, kebijaksanaan perencanaan muncul sebagai hasil proses analisis, dan seluruh wujud perencanaan merupakan proses analisis.

Dalam analisis seringkali dihadapi berbagai kesulitan antara lain : ketersediaan data dan penentuan daerah perencanaan (Warpani : 1984). Data tidak selalu tersedia seperti yang diinginkan bagi kepentingan analisis akibat sistem pencatatan datanya yang belum seragam.

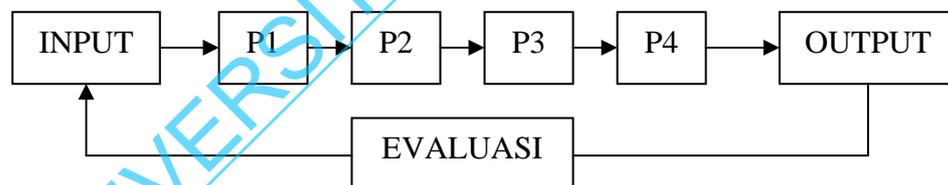
F. Proses Perencanaan Konvensional dan Inkonvensional.

Suatu proses perencanaan dapat ditempuh secara konvensional yaitu rangkaian proses perencanaan yang ideal di mana berbagai komponen dan langkah-langkah penyusunan rencana dapat dipenuhi secara bertahap dan cermat. Proses perencanaan konvensional biasanya hanya dapat dilakukan dengan masukan data dan informasi yang lengkap serta berbagai preperat, prosedur dan aparat teknis yang lengkap pula.

Pada kenyataannya seringkali terjadi keadaan dimana proses perencanaan konvensional sangat sukar dilaksanakan mengingat adanya keterbatasan data, informasi dan berbagai kekurangan kemampuan sumber daya manusia serta preparat dan prosedur yang tersedia. Untuk mengatasi ini sering dilakukan suatu proses yang menempuh “jalan pintas”. Proses perencanaan demikian sering disebut sebagai suatu proses perencanaan inkonvensional. Jadi dalam proses perencanaan inkonvensional ini beberapa tahapan dilakukan dengan cara yang lebih singkat tetapi tetap dilaksanakan secara sistematis.

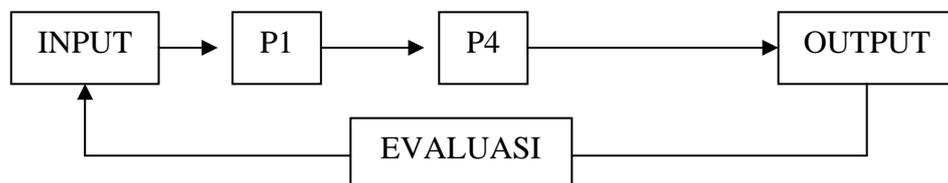
Proses perencanaan konvensional dan inkonvensional dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2. Proses Perencanaan Konvensional



Sumber : Branch, Menville, 1983.

Gambar 2.3. Proses Perencanaan Inkonvensional



Sumber : Branch, Menville, 1983.

Secara umum suatu proses perencanaan akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah 1 : Perumusan dan pendefinisian masalah tahap awal.

1. Penelaahan lapangan berdasarkan ruang lingkup yang ditentukan,
2. Penentuan keadaan dan keterbatasan di lapangan,
3. Analisis data,
4. Perbandingan keadaan nyata, proyeks-proyek berdasarkan kendala dan keterbatasan yang ada,
5. Penilaian permasalahan yang dirumuskan dengan mendasarkan kepada hasil analisis,
6. Penyesuaian hasil perumusan masalah dengan fakta yang ada.

Langkah 2 : Perumusan dan penentuan sistem perencanaan yang akan dikembangkan.

1. Pertimbangan esensi perencanaan,
2. Pertimbangan sasaran dan tujuan pembangunan,
3. Aparat perencanaan yang ada,
4. Perkiraan sumberdaya yang diperlukan dalam proses perencanaan,
5. Persiapan proses teknis perencanaan,
6. Keputusan untuk melaksanakan perencanaan.

Langkah 3 : Perumusan dan pendefinisian masalah tahap awal.

1. Peninjauan kembali perumusan masalah yang menjadi landasan perencanaan,
2. Penstrukturan masalah perencanaan,
3. Identifikasi kendala berpengaruh,
4. Penentuan kendala pengaruh,
5. Peninjauan studi dan masalah yang berkaitan dengan perencanaan,

6. Operasional pengumpulan data,
7. Analisis data,
8. Penafsiran dan proyeksi,
9. Sintesa permasalahan,
10. Pengembangan pendekatan pemecahan masalah,
11. Kompilasi data dan sistematika hasil analisis.

Langkah 4 : Pengembangan dasar-dasar pertimbangan perencanaan.

1. Identifikasi dan limitasi,
2. Pertimbangan sasaran dan tujuan pembangunan,
3. Pertimbangan tentang kemungkinan untuk mencapai sasaran dan tujuan rencana,
4. Penyaringan rumusan sasaran dan tujuan.

Langkah 5 : Perumusan norma-norma, standar perencanaan.

1. Diskripsi sasaran dan tujuan yang telah disaring,
2. Penjabaran sasaran dan tujuan ke dalam norma-norma dan standar,
3. Pertimbangan program dan penjelasan perancangan.

Langkah 6 : Pengembangan alternatif rencana.

1. Penentuan dan seleksi prosedur perencanaan,
2. Pengembangan alternatif rencana.

Langkah 7 : Ujicoba alternatif rencana.

1. Pengumpulan pendapat/*input* baru,
2. Perbandingan alternatif rencana dengan mempertimbangkan pendapat/*input* baru,
3. Studi kelayakan alternatif.

Langkah 8 : Evaluasi Rencana.

1. Evaluasi terhadap alternatif yang telah di studi kelayakannya,
2. Rekomendasi alternatif rencana terpilih.

Langkah 9 : Penentuan keputusan.

1. Diskripsi tentang kriteria pengambilan keputusan,
2. Forum pengambilan keputusan,
3. Pemutusan rencana yang akan dipakai.

Langkah 10 : Prosedur pengesahan rencana.

Langkah 11 : Proses Pelaksanaan.

1. Pembentukan dan pemantapan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
2. Pemrograman dan pelaksanaan operasional pembangunan.

Langkah 12 : Pengembangan dasar-dasar pertimbangan perencanaan.

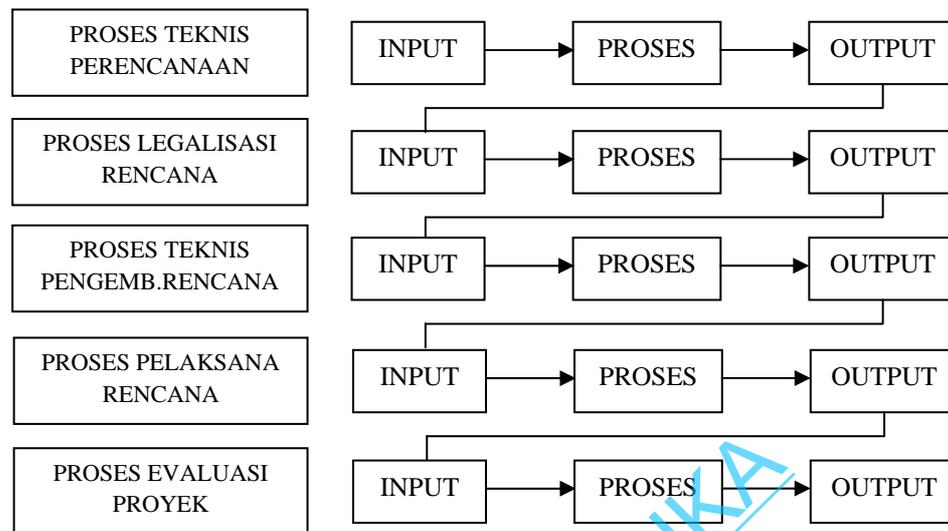
1. Pemantauan pelaksanaan pembangunan,
2. Analisis kondisi-kondisi baru,
3. Sintesa mengenai masalah-masalah dan kendala keterbatasan di dalam operasional pelaksanaan pembangunan,
4. Evaluasi masalah nyata dan mengembangkan masukan baru.

Secara teknis proses perencanaan akan meliputi 4 tahapan, yaitu :

1. Tahapan proses teknis perencanaan.
2. Tahapan proses legalisasi rencana.
3. Tahapan proses teknis pengembangan teknis rencana.
4. Tahapan proses perencanaan pelaksanaan rencana.

Produk proses teknis perencanaan akan saling menunjang satu sama lain di mana keluaran (*output*) dari suatu proses akan menjadi masukan bagi proses yang lainnya.

Gambar 2.4. Teknis Proses Perencanaan



Sumber : Branch, Menville, 1983.

G. Evaluasi Kinerja.

Evaluasi kinerja disebut juga “*Performance evaluation*” atau “*Performance appraisal*”. *Appraisal* berasal dari kata Latin “*appratiare*” yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai orang lain. Leon C. Mengginson mengemukakan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah “penilaian prestasi kerja (*Performance appraisal*), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.” (Dalam Mangkunegara, 2005:10).

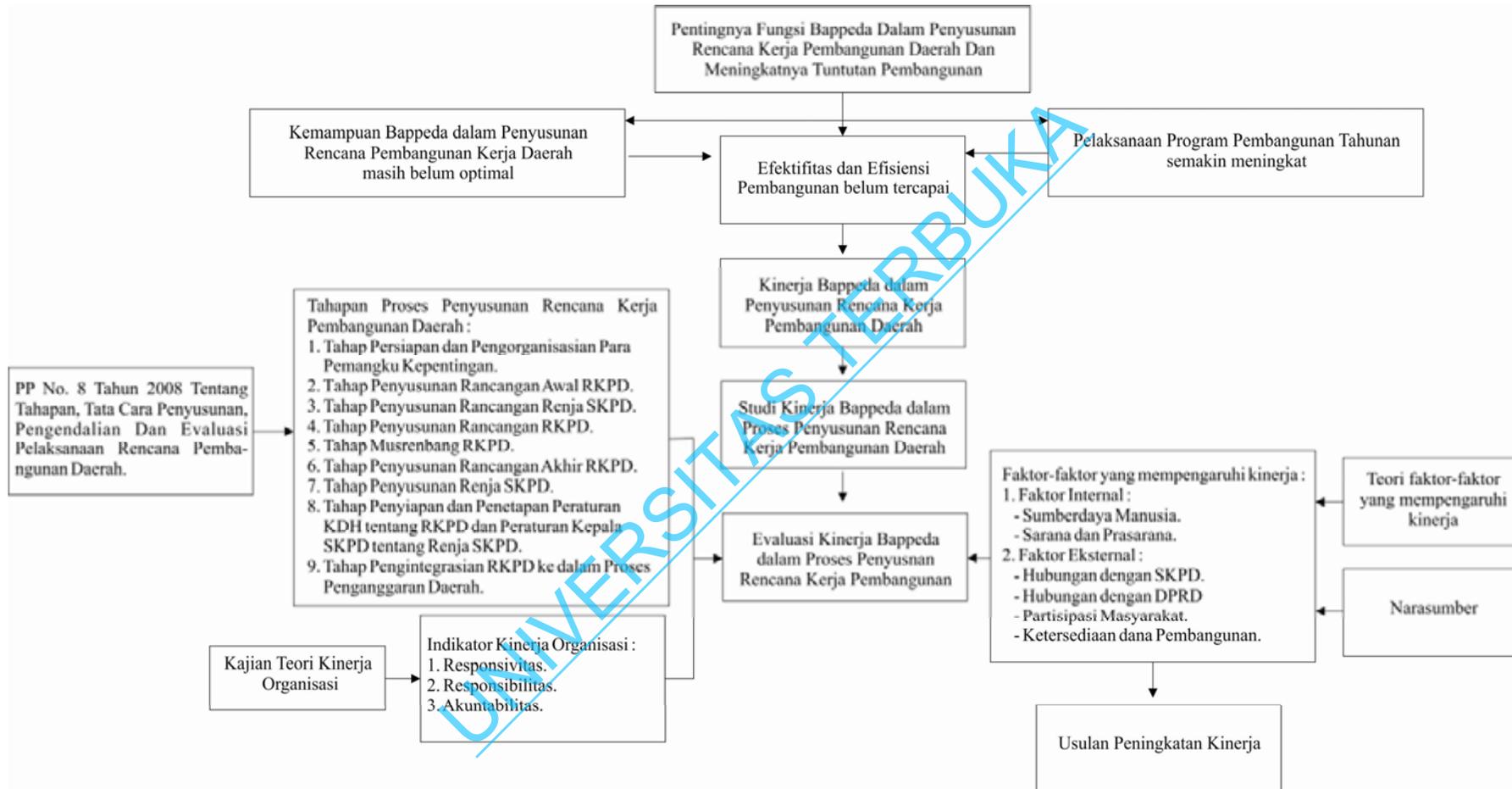
Berdasarkan pendapat di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur kedepannya. Evaluasi harus sering dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik. Evaluasi kinerja yang dikemukakan Payaman J. Simanjuntak adalah “suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.” (Simanjuntak, 2005:103). Berdasarkan pengertian tersebut maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan prestasi kerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya menurut tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Evaluasi kinerja kemudian di definisikan oleh *Society for Human Resource Management* yaitu “*The process of evaluating how well employees perform their jobs when compared to a set of standards, and then communicating that information to employees.* (Proses mengevaluasi sejauh mana kinerja aparatur

dalam bekerja ketika dibandingkan dengan serangkaian standar, dan mengkomunikasikan informasi tersebut pada aparatur).” (Dalam Wirawan 2009:12)

Berdasarkan definisi di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparatur bila dibandingkan dengan serangkaian standarisasi yang dilakukan untuk bekerja sesuai komunikasi informasi yang telah diberikan oleh pimpinan. Evaluasi kinerja dilakukan juga untuk menilai seberapa baik aparatur bekerja setelah menerima informasi dan berkomunikasi dengan aparatur yang lain agar pekerjaan sesuai dengan kemauan pimpinan dan kinerja para aparatur itu sendiri dapat terlihat secara baik oleh pimpinan dan masyarakat selaku penilai.

UNIVERSITAS TERBUKA

H. Kerangka Berpikir.



I. Hipotesis Kerja.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian maka dibuat hipotesis kerja sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek responsivitas; masih belum adanya kepekaan BAPPEDA terhadap usulan atau aspirasi dari masyarakat.
2. Dilihat dari aspek responsibilitas; masih belum maksimalnya BAPPEDA dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Dilihat dari aspek akuntabilitas; masih kurangnya koordinasi BAPPEDA bersama SKPD dalam menyusun kebijakan pembangunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.

Penelitian ini adalah tergolong sebagai metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif positivistik, yaitu studi yang merupakan bagian dari proses penelitian dalam pencarian penjelasan dan keterangan tentang suatu kegiatan yang telah terjadi, seberapa jauh pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi secara evaluatif.

Cara penelitian ini dilakukan karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak langsung dapat diungkap, sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian ini membutuhkan data berupa pendapat secara mendalam dari permasalahan yang ada, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Upaya pengkajian terhadap kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah mencakup penilaian atas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD tersebut pada tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Untuk melakukan hal tersebut maka terlebih dahulu indikator-indikator sebagai tolok ukur kinerja dan cara menganalisisnya.

B. Narasumber dan Informan.

Penentuan narasumber dan informan ini dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih narasumber yang paling berkompeten memberikan informasi dan data yang diperlukan yaitu beberapa pejabat dan pegawai di lingkungan BAPPEDA dan DPRD yang terkait dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Hal tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu menggali informasi seakurat dan selengkap mungkin. Untuk ini dipilihlah narasumber yang benar-benar mengetahui dan terkait dengan permasalahan penelitian.

Penelitian lapangan ini dengan melakukan wawancara dan observasi menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan dan kompilasi data penelitian ini tidak melibatkan semua personal BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir ke dalam satu populasi yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan cara pengambilan atau pengumpulan data secara tidak acak (khusus data/informasi mengenai penyusunan rencana), dan hanya terfokus pada data/informasi yang diperoleh serta dianggap dapat mewakili dan dapat dipercaya sebagai pelaksana dan terkait dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu : 1 (satu) orang Kepala BAPPEDA, 1 (satu) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang PPTK, 3 (tiga) orang Kepala SKPD dan 1 (satu) orang anggota Badan Anggaran DPRD sebagai narasumber, hal ini dilakukan karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya.

Gambar 3.1. Penentuan Narasumber



C. Teknik Pengumpulan Data.

Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan dari BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir. Data ini digunakan sebagai pendukung. Data primer yang di dapat melalui pengumpulan data dilapangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang bisa menjawab pertanyaan peneliti secara tuntas, sehingga diharapkan bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek atau narasumber dan informan kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya serta interprestasi subyek atau narasumber tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti,

sehingga permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini bisa terjawab secara rinci dan bisa dipertanggung jawabkan.

Data yang diperoleh dari wawancara ini adalah pandangan maupun persepsi narasumber berdasarkan pengalaman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan terinci. Observasi yang dilakukan peneliti adalah langsung mengamati dan ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh narasumber. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Data yang diperoleh dari hasil observasi berupa kelengkapan administrasi Tim Pokja dan Buku Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Pengolahan Data dan Analisis.

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber dan informan direkam dan ditulis sebagai catatan tertulis, kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan data yang didapat dari narasumber tersebut, kejelasan jawaban atas pertanyaan peneliti, relevansi jawaban terhadap pertanyaan dan konsistensi jawaban narasumber atas pertanyaan yang diajukan, lalu data yang didapat dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif.

Analisa data disini adalah untuk memahami data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga dapat menjadi suatu rumusan yang mudah

dimengerti dan menemukan suatu pola umum yang dihasilkan dari data tersebut, dilakukan analisa secara kualitatif. melalui metode deskriptif kualitatif, sehingga akan menggambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan. Secara rinci penulis melakukan kegiatan analisis data dengan tahapan sebagai berikut : wawancara dilakukan kepada subyek penelitian, selanjutnya hasil wawancara tersebut ditranskripsikan dalam bentuk narasi, untuk kemudian penulis sesuaikan kembali kategori berdasarkan variabel dan aspek yang telah disusun, agar peneliti lebih mudah dalam menginterpretasikan data.

E. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sebagai alat analisa untuk mengukur kinerja BAPPEDA dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah digunakan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Responsivitas, diukur dengan :
 - a. Daya tanggap atau kepekaan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat;
 - b. Penyusunan prioritas program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat;
 - c. Kepuasan masyarakat terhadap program/kegiatan yang disusun BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Responsibilitas, diukur dengan indikator :
 - a. Ketaatan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengikuti tahapan-tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, seperti yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - b. Ketaatan terhadap prinsip-prinsip kebijaksanaan organisasi;
 - c. Kesesuaian antara program dan pelaksanaan dengan prosedur organisasi;
3. Akuntabilitas, diukur dari :
 - a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.

Prosedur kinerja pada masing-masing tahapan dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah mencakup beberapa aspek yang terdiri dari :

1. Penentuan indikator dan variabel.

Indikator yang digunakan sebagaimana telah diungkapkan diatas, terbagi atas dua dan tiga kategori, dan masing-masing mengandung beberapa variabel.

2. Pembuatan kesimpulan dari hasil wawancara terhadap pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:
 - a. Persiapan dan Pengorganisasian para Pemangku Kepentingan.
 - b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.
 - c. Penyusunan Rancangan Renja SKPD.
 - d. Penyusunan Rancangan RKPD.
 - e. Musrenbang.
 - f. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.
 - g. Penyusunan Renja SKPD.
 - h. Penyiapan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tentang RKPD dan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD.
 - i. Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

1. Pembentukan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Nomor : Kpts.24/82.821.21, tanggal 01 Nopember 1982, dikukuhkan kembali sebagai Pelaksana Harian Ketua BAPPEDA Tingkat II Indragiri Hilir (01 Nopember 1982 sampai dengan 31 Desember 1984), dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Nomor : Kpts.166/HK/1982, tanggal 21 Desember 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA dan Pengembangan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dan dalam memenuhi Struktur Organisasi maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan beban kerja yang ada BAPPEDA Tingkat II Indragiri Hilir menggunakan Pola Organisasi BAPPEDA Tingkat II Type B. Dengan Struktur Organisasi BAPPEDA terdiri dari :

- Ketua Badan,
- Sekretariat,

- Bidang Pendataan dan Laporan,
- Bidang Ekonomi,
- Bidang Sosial Budaya
- Bidang Fisik dan Prasarana.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah, diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dan dalam rangka upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kewenangan pemerintah yang antara lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, sementara kewenangan propinsi yang diatur pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menetapkan kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, dengan demikian kewenangan kabupaten adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara makro.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pengaturan tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1984 sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan karenanya perlu ditinjau kembali.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, karena hanya mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA, sedangkan perincian tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pimpinan unit dan sub unit organisasi di lingkungan BAPPEDA akan diatur tersendiri melalui keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan Daerah ini.

Struktur Organisasi BAPPEDA terdiri dari:

- Kepala Badan, dan 4 bidang,
- Bidang KTU,
- Bidang Penelitian pengembangan dan Evaluasi,
- Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya,
- Bidang Fisik dan Prasarana Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- Kepala Badan,
- Sekretariat,

- Bidang Sosial Budaya,
- Bidang Ekonomi,
- Bidang Fisik dan Prasarana.
- Bidang Pendataan, Kerjasama, Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi.
- Jabatan Fungsional.

2. Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Visi dan Misi Visi dari BAPPEDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah "TERWUJUDNYA PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERPADU DAN TERPERCAYA". Untuk itu BAPPEDA akan melaksanakan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang terpadu dan terkendali.
- b. Mewujudkan penelitian dan pengembangan daerah yang efisien, efektif dan aplikatif.
- c. Mewujudkan profesionalisme aparatur perencanaan yang berkualitas.

3. Komposisi Pegawai, sarana dan prasarana BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

- a. Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Komposisi pegawai BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah

ditetapkan. Adapun komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- 1) Pasca Sarjana (S2) sebanyak 9 orang.
- 2) Sarjana (S1) sebanyak 24 orang.
- 3) Diploma sebanyak 2 orang.
- 4) SLTA sebanyak 15 orang.

b. Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Disamping sumberdaya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. daftar sarana dan prasarana dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.2.

B. Kinerja Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. BAPPEDA sebagai suatu lembaga yang berfungsi dan bertugas dalam perencanaan pembangunan di daerah, diharapkan mampu melaksanakan secara maksimal, dalam pengertian bahwa BAPPEDA mensinergikan perencanaan *top-down* dan *bottom up planning*.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 31 Desember.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Secara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD dapat dibagi dalam sembilan tahapan utama sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan dan Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan.

Pada tahap ini kualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauhmana kematangan dalam tahap persiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauh keterlibatan para pemangku kepentingan. Tahapan persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan meliputi: orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja, Penyiapan Dokumen RKPD, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD.

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsibilitas oleh narasumber pada tahap persiapan penyusunan RKPD apakah terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang menyangkut dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Untuk itu dapat dilihat melalui pernyataan/jawaban narasumber kepada peneliti pada saat peneliti

melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber menggunakan rekaman.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

“Memang benar..sebelum diadakannya penyusunan RKPD, itu biasanya memang dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan yang biasanya melibatkan partisipasi dari masyarakat daerah setempat secara langsung..tapi hal ini jarang dilakukan sehingga data yang diperoleh selama ini hanya berdasarkan hasil pengumpulan data dari BAPPEDA.”

Terkait dengan tahap persiapan yang harus dilakukan dalam penyusunan RKPD, pernyataan senada juga disampaikan oleh narasumber III pada wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa:

“Kami sebagai tim pelaksana untuk membantu pelaksanaan unit pelayanan yang telah ditetapkan hanya bisa memberikan sedikit masukan pada penyusunan RKPD tentang kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas saat ini, hal ini dimaksud agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi.”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Kamis tanggal 6 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber VI menyatakan bahwa:

“Benar, sebelum diadakannya penyusunan RKPD, itu biasanya memang dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan data dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat daerah setempat secara langsung. tapi hal ini jarang dilakukan sehingga data yang diperoleh selama ini hanya berdasarkan hasil pengumpulan data dari BAPPEDA.”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Jumat tanggal 7 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber V menyatakan bahwa:

“ya bisanya, sebelum diadakannya penyusunan RKPD, itu biasanya memang dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu.

Pengumpulan data dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat daerah setempat secara langsung, tapi hal ini jarang dilakukan sehingga data yang diperoleh selama ini hanya berdasarkan hasil pengumpulan data dari BAPPEDA.”

Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari narasumber I berdasarkan hasil wawancara hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa:

“Ya..tentu saja sebelum kita melakukan penyusunan RKPD terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data terkait dengan kebutuhan masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan..karena RKPD ini merupakan rencana tahunan maka dalam penyusunan harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya.”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Jumat tanggal 19 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber IV menyatakan bahwa:

“Hal itu tentu sepenuhnya menjadi hak pemh dari BAPPEDA dalam menetapkan dan menyusun RKPD tahunan..tentang bagaimana atau tahapan apa yang harus dilakukan sebelum melakukan penyusunan RKPD ini, ya tentunya kita berharap penganggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kumpulan dari data dan informasi yang valid.”

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana tingkat Akuntabilitas oleh narasumber pada tahap persiapan penyusunan RKPD apakah memiliki skala prioritas yang harus didahulukan. Adapun pernyataan/jawaban narasumber kepada peneliti.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

“Pastinya demikian ya..kita harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan yang dianggap urgent untuk direalisasikan..kami selalu berusaha agar infrastruktur atau kebutuhan urgent dari masyarakat dapat terealisasi dengan cepat dan tepat.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh narasumber III pada wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa:

"Ya..harusnya demikian..agar kita sebagai pelaksana dilapangan dapat melaksanakan tugas dengan baik, efektif dan efisien.."

Sedangkan hasil wawancara Senin tanggal 10 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber I menyatakan bahwa:

"Ya..itulah gunanya informasi dan data yang kita kumpulkan itu sebelum melakukan penyusunan RKPD, kita ingin mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendesak dari masyarakat sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan, inffrastruktur dapat lebih baik lagi. Percuma dong otonomi daerah jika kita tidak memperhatikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat."

Sedangkan hasil wawancara Jumat tanggal 19 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber IV menyatakan bahwa:

"Ooo tentu..karena ini berkaitan dengan penggunaan anggaran maka sudah seharusnya dalam penyusunan RKPD berdasarkan skala prioritas."

Sebagaimana diketahui dalam penyusunan RKPD berkaitan langsung dengan penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan. Hal ini membutuhkan pelaksana lapangan yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan, baik pengendalian kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan perkembangan kegiatan, dan penyiapan dokumen penganggaran. Untuk itu sangat diperlukan tim pendukung yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut agar terlaksana dengan semestinya, oleh karena itu agar pelaksanaan program terlaksana secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan penyusunan

yang berdasarkan atas pengumpulan informasi dan data-data dilapangan secara langsung dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Kinerja Tahap Persiapan dan Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir diukur dengan Indikator Responsibilitas dan Akuntabilitas, sedangkan Indikator Responsivitas tidak digunakan, karena indikator tersebut kurang tepat dan relevan untuk mengukurnya, dalam tahap ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, namun dalam pembentukan Tim Penyusun RKPD hanya melibatkan unsur Bidang dan staf dalam lingkungan BAPPEDA dan tidak melibatkan unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/LSM dan unsur SKPD yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Tahap Persiapan dan Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan sudah cukup baik, namun yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan tahap ini adalah pemangku kepentingan seperti unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/LSM dan unsur SKPD yang terkait. Keterlibatan pemangku kepentingan akan cukup berpengaruh terhadap penyusunan RKPD karena dalam prosesnya dibuat secara tertulis, akurasi dan kelengkapan informasi serta kebijakan yang

disusun dilakukan komunikasi secara bersama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.5.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Tahap Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsibilitas oleh narasumber pada tahap penyusunan Rancangan Awal RKPD apakah juga membahas usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu.

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

“Ya..kegiatan tahun lalu yang belum terlaksana ditinjau ulang dan dibahas kembali agar dapat segera dilaksanakan”.

Sedangkan hasil wawancara Senin tanggal 10 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber I menyatakan bahwa:

"Ya..kita kembali mereview kegiatan tahun lalu yang belum terlaksana untuk dapat direalisasikan secepatnya pada tahun berkenaan."

Berdasarkan hasil wawancara Kamis tanggal 6 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber III menyatakan bahwa:

"sebenarnya, terkadang jika kegiatan tahun lalu yang belum terlaksana akan ditinjau ulang dan dibahas kembali agar dapat segera dilaksanakan".

Berdasarkan hasil wawancara Kamis tanggal 20 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber VII menyatakan bahwa:

"Ya, dalam menyusun RKPD yang baru terkadang kegiatan tahun lalu yang belum terlaksana ditinjau ulang selanjutnya dibahas kembali agar dapat segera dilaksanakan".

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana tingkat Akuntabilitas oleh narasumber pada tahap penyusunan Rancangan Awal RKPD apakah data-data yang disajikan BAPPEDA memberi kemudahan dalam menyusun rencana awal RKPD.

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

"Data ini tidak selalu diberikan untuk menunjang dalam Ya..tentunya data-data yang akurat akan lebih memudahkan dalam menyusun rencana awal RKPD, tetapi terkadang penyusunan rencana awal."

Kegiatan mereview ulang ini tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap penggunaan belanja daerah. Hal ini disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber IV berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa:

“Melalui data yang disajikan secara akurat akan sangat membantu dalam penyusunan rencana awal RKPD, yang nantinya akan berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah tahun bersangkutan.”

Terdapat dua langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah yaitu melakukan alokasi pada prioritas, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dipergunakan secara maksimal dan meningkatkan efisiensi belanja dengan meminimalkan biaya, sehingga tersedia dana yang lebih besar untuk memperkuat prioritas pembangunan nasional.

Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD diukur dengan Indikator Responsibilitas dan Akuntabilitas adalah cukup baik, dimana usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu yang belum terakomodir dilakukan review untuk ditindaklanjuti kembali pada tahun berkenaan dengan melibatkan bidang-bidang perencana pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri dengan berkoordinasi SKPD yang terkait. Selain itu BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan menjadi pusat administrasi data bagi SKPD, juga sebagai fasilitator dalam memberikan kemudahan dan kejelasan informasi guna kepentingan perencanaan hendaknya dapat menyediakan data yang akurat yang dapat dipergunakan dalam penyusunan RKPD awal.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan berdasarkan hasil wawancara Senin tanggal 10 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa:

"BAPPEDA akan sangat membantu dalam hal penyediaan data..selain itu biasanya data juga ditunjang oleh data yang diperoleh langsung dari BPS, ataupun melalui observasi lapangan, sehingga akurasi data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan issue yang berkembang saat berkenaan."

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Rabu tanggal 5 Oktober 2011 menyatakan bahwa:

"Ya..tentunya data-data yang akurat akan lebih memudahkan dalam menyusun rencana awal RKPD, tetapi terkadang data ini tidak selalu diberikan untuk menunjang dalam penyusunan rencana awal."

Hal ini dipertegas dengan pernyataan berdasarkan hasil wawancara Jum`at tanggal 07 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa:

"Dalam hal penyediaan data, biasanya data diperoleh langsung dari BPS, ataupun melalui observasi lapangan, sehingga akurasi data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan issue yang berkembang saat pembahasan RKPD."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kamis tanggal 6 Oktober 2011 menyatakan bahwa:

"Ya, data-data yang akurat akan lebih memudahkan dalam menyusun rencana awal RKPD, tetapi terkadang data ini tidak selalu diberikan untuk menunjang dalam penyusunan rencana awal."

Hal ini dipertegas dengan pernyataan berdasarkan hasil wawancara Kamis tanggal 20 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa:

"ya, biasanya data diperoleh langsung dari BPS, ataupun melalui observasi lapangan dan juga dari BAPPEDA, sehingga akurasi data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan issue yang berkembang saat pembahasan RKPD."

Penyusunan rencana pembangunan di daerah merupakan tugas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh suatu instansi yang

mempunyai peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikenal dengan sebutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan secara institusional diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD diukur dengan Indikator Responsibilitas dan Akuntabilitas adalah cukup baik, namun yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan tahap ini adalah data disajikan belum tepat waktu dan terkadang data tersebut tidak diberikan kepada SKPD sehingga SKPD kesulitan dalam menyusun perencanaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.6.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Tahap Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan

penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Keberadaan BAPPEDA selaku lembaga yang melakukan Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi (KISS) perencanaan pembangunan dan penilaian/evaluasi atas pelaksanaannya di daerah di tengah-tengah masyarakat dan birokrasi sangat dibutuhkan dalam upaya menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat di bidang perencanaan dan penilaiannya.

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsibilitas oleh narasumber pada tahap penyusunan Rancangan Renja SKPD apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan dari organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 narasumber II menyatakan bahwa:

“Renja yang dibuat harus sesuai dengan sasaran pembangunan, sedangkan sasaran bidang yang akan dicapai merupakan kontribusi dari sektor yang bersangkutan untuk mencapai sasaran umum”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 narasumber IV menyatakan bahwa:

“dalam Renja yang dibuat harus sesuai dengan sasaran pembangunan, sedangkan sasaran bidang yang akan dicapai merupakan kontribusi dari sektor yang bersangkutan untuk mencapai sasaran umum”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 narasumber VII menyatakan bahwa:

“ya, yang dibuat dalam Renja harus sesuai dengan sasaran pembangunan, sedangkan sasaran bidang yang akan dicapai

merupakan kontribusi dari sektor yang bersangkutan untuk mencapai sasaran umum”.

Sedangkan hasil wawancara Senin tanggal 10 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber I menyatakan bahwa:

“Ditinjau dari rancangan RKPD yang akan dibuat harus sesuai dengan prinsip dan kebijakan dari organisasi, dimana BAPPEDA sebagai selaku lembaga yang melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplikasi perencanaan pembangunan dan penilaian/evaluasi atas pelaksanaannya di daerah perlu menyesuaikan dengan prinsip kebijakan dari organisasi.”

Keberhasilan BAPPEDA melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah juga ditentukan oleh kemampuannya untuk menggali serta menggerakkan dukungan dari lingkungan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber III pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa:

“Keberhasilan BAPPEDA selaku lembaga perencana di daerah sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk menggerakkan dukungan dari lingkungan yang terlibat yang juga tentunya sesuai dengan prinsip dan kebijakan dari organisasi.”

Berkenaan dengan fungsi koordinator maka Haryanto (1992) mengemukakan bahwa suatu unit tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dibantu oleh unit lain, dan oleh karena itu pula maka setiap unit mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksana fungsi dari unit lainnya apabila organisasi yang bersangkutan menginginkan untuk mencapai tujuan dengan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana tingkat Akuntabilitas oleh narasumber pada tahap Penyusunan Rancangan Renja SKPD apakah

SKPD melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dalam penyusunan Renja SKPD.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 dengan narasumber I menyatakan bahwa:

“Koordinasi selalu berusaha untuk dilakukan dalam penetapan Renja SKPD pada rancangan penyusunan RKPD awal saja, mengingat dimana SKPD memerlukan informasi dan data dari BAPPEDA.”

Kegiatan mereview ulang ini tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap penggunaan belanja daerah. Hal ini disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber IV berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa:

“Melalui data yang disajikan secara akurat akan sangat membantu dalam penyusunan rencana awal RKPD, yang nantinya akan berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah tahun bersangkutan.”

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

“Ya..itu tentunya koordinasi pasti dilakukan mengingat fungsi BAPPEDA yang juga sebagai koordinator...”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber III pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa:

“Setahu saya ya..janganakan antara BAPPEDA dengan SKPD, setiap lini yang berkaitan selalu berusaha melakukan koordinasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Rancangan Renja

SKPD diukur dengan Indikator Responsibilitas dan Akuntabilitas adalah cukup baik, BAPPEDA bersama dengan SKPD hanya berkoordinasi dalam Penyusunan Rancangan Renja SKPD berdasarkan pada Rancangan Awal RKPD yang telah disusun.

BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan menjadi pusat administrasi data bagi SKPD juga membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan SKPD dalam rangka penyusunan rancangan Renja SKPD, sehingga memberikan kemudahan bagi SKPD dalam melakukan bentuk rancangan awal RKPD dari BAPPEDA, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.7.

4. Tahap Penyusunan Rancangan RKPD.

Merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk diperbaiki menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD Provinsi disampaikan kepada Bappenas, sedangkan ringkasan RKPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bappenas dan BAPPEDA Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi.

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsibilitas oleh narasumber pada tahap penyusunan Rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas dari kepentingan umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Senin tanggal 17 Oktober menyatakan bahwa:

“Umumnya sudah sesuai..tetapi kadang realisasi yang kami laksanakan dilapangan ternyata kalau dilihat bukan menjadi kepentingan yang cukup prioritas.”

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

“Menurut saya itu sudah pasti..ya tentunya juga dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.”

Pernyataan diatas berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin tanggal 10 Oktober dengan salah satu narasumber menyebutkan bahwa:

“Rancangan RKPD yang dibuat sudah tentu disesuaikan dengan prioritas dari apa yang menjadi kepentingan umum saat ini, yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan daerah, sumber-sumber pembiayaan dan juga pemanfaatan. Untuk itulah kami selalu berkoordinasi dengan DPRD khususnya pada lini anggaran untuk dapat merelasisasikan kebijakan yang ada sesuai dengan anggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan.”

Sejalan dengan pendapat ini juga didukung oleh pernyataan dari narasumber lain yang menyebutkan:

“DPRD hanya perlu menyetujui RKPD yang dibuat sehingga apa yang menjadi kepentingang yang sfatnta urgent bagi masyarakat dapat terlaksana dengan secepatnya..karena hal ini juga menyangkut anggaran jadi ya harus disesuaikanlah..”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Kamis tanggal 06 Oktober menyatakan bahwa:

“Renja pada umumnya sudah sesuai, tetapi kadang realisasi yang kami laksanakan dilapangan ternyata kalau dilihat bukan menjadi kepentingan yang cukup prioritas.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Kamis tanggal 20 Oktober menyatakan bahwa:

“RKPD pada umumnya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, tetapi kadang realisasi yang kami laksanakan dilapangan ternyata kalau dilihat bukan menjadi kepentingan yang cukup prioritas.”

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana tingkat Akuntabilitas oleh narasumber pada tahap Penyusunan Rancangan RKPD apakah BAPPEDA memberikan kemudahan dan kejelasan informasi guna penyusunan perencanaan.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 dengan narasumber I menyatakan bahwa:

“Ya, informasi akan diberikan guna mendukung pelaksanaan berbagai program kegiatan.”

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

“Pasti, itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab BAPPEDA dalam memberikan informasi dan data-data yang mendukung.”

Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala BAPPEDA, dan

materi program/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah. Selain dan itu, Bappeda juga harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada *bottom-up planning*, sesuai dengan semangat demokrasi yang mendudukan masyarakat sebagai *real-principal* bagi keberadaan negara ini.

BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan Penyusunan Rancangan RKPD ini dengan melakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan kepala SKPD kepada BAPPEDA. Sejauh ini kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Rancangan SKPD diukur dengan Indikator Responsibilitas adalah cukup baik, bahwa BAPPEDA menyusun Rancangan RKPD yang merupakan hasil rekapitulasi dan sinkronisasi terhadap Rencana Program dan Kegiatan Prioritas.

Begitu juga halnya dengan akuntabilitas kinerja BAPPEDA pada tahap ini juga cukup baik karena BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan menjadi pusat administrasi data bagi SKPD, juga sebagai fasilitator dalam memberikan kemudahan dan kejelasan informasi guna kepentingan perencanaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.8.

5. Tahap Musrenbang.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD adalah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan/Musrenbang, forum SKPD/Gabungan SKPD, serta kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Musrenbang tahunan dan forum SKPD dilaksanakan pada setiap tahun perencanaan yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsivitas oleh narasumber pada tahap Musrenbang apakah pada saat pelaksanaan Musrenbang masyarakat memiliki keterlibatan atau partisipasi yang cukup baik.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Rabu tanggal 5 Oktober 2011 tentang keterlibatan masyarakat pada musrenbang menyebutkan bahwa:

"Kalau dari kita secara langsung tidak..mungkin dari kelurahan ada partisipasi langsung dari masyarakat ataupun pihak pemangku kepentingan."

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Kamis tanggal 6 Oktober 2011 tentang keterlibatan masyarakat pada Musrenbang menyebutkan bahwa:

"Kalau lihat secara langsung tidak, mungkin dari kelurahan ada partisipasi langsung dari masyarakat ataupun pihak pemangku kepentingan."

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Jumat tanggal 7 Oktober 2011 tentang keterlibatan masyarakat pada Musrenbang menyebutkan bahwa:

“ ya, kelurahan tidak ada partisipasi langsung dan juga dari masyarakat ataupun pihak pemangku kepentingan.”

Selain itu hasil wawancara dengan narasumber lain menyebutkan pentingnya melibatkan partisipasi dari masyarakat tentang pelaksanaan musrenbang ini. Narasumber ini menyebutkan bahwa:

“BAPPEDA perlu melakukan optimalisasi terhadap partisipasi dari masyarakat sehingga diharapkan dari partisipasi ini akan memberikan hasil yang optimal dalam membuat rancangan kerja pembangunan daerah.”

Selain itu hasil wawancara dengan narasumber lain menyebutkan pentingnya melibatkan partisipasi dari masyarakat tentang pelaksanaan musrenbang ini. Narasumber ini menyebutkan bahwa:

“ya, perlu ada optimalisasi oleh BAPPEDA terhadap partisipasi dari masyarakat sehingga diharapkan dari partisipasi ini akan memberikan hasil yang optimal dalam membuat rancangan kerja pembangunan daerah.”

Pernyataan yang sama menyangkut keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat juga didapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber pada wawancara yang dilakukan Senin tanggal 10 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa:

“Sejauh ini kita belum secara kontiniu melibatkan partisipasi dari masyarakat ataupun pemangku kepentingan..kita berusaha melaksanakan Musrenbang ini sesuai dengan PP No 8 tahun 2008 itu tadi..”

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsibilitas oleh narasumber pada tahap Musrenbang apakah pelaksanaan Musrenbang pada masing-masing tingkatan selama ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Senin tanggal 17 Oktober menyatakan bahwa:

"Kayaknya belum..karena saya melihat dari sisi masih adanya program yang sebenarnya bukan menjadi prioritas bagi masyarakat."

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

"Belum..masih banyak kekurangannya.."

Pernyataan diatas berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin tanggal 10 Oktober dengan salah satu narasumber menyebutkan bahwa:

"Hmmm...saya rasa belum ya..belum optimal.."

Sejalan dengan pendapat ini juga didukung oleh pernyataan dari narasumber lain yang menyebutkan:

"Hehe..kurang tau saya..tapi menurut pengamatan saya masih perlu banyak perbaikan."

Pelaksanaan Musrenbang ini perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat atau pemangku kepentingan, karena hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan dari masyarakat agar musrenbang dapat menghasilkan berbagai program kegiatan yang menjadi prioritas dan

strategis guna mencapai tujuan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat

Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggungjawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yang berkomitmen untuk melaksanakannya, dibawah koordinasi Kepala BAPPEDA. Agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan keluaran yang optimal serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, maka dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapan sampai dengan paska musrenbang perlu difasilitasi oleh fasilitator yang memadai.

Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD dan forum SKPD juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat (*top-down* dan *bottom-up approach*), serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD atau forum gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD atau Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota

sendiri menjadi masukan bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang provinsi, musrenbang pusat dan musrenbang nasional maupun dalam rangka penyusunan rancangan akhir RKPD.

Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD atau gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota dikoordinasikan dan difasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota yang pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota, sedangkan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Musrenbang diukur dengan Indikator Responsivitas dan Responsibilitas adalah cukup baik, karena keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan aspirasi pada pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten mungkin baru terlaksana pada lini kelurahan atau kecamatan, untuk itu diharapkan kedepannya dapat melibatkan pada lini yang lebih tinggi lagi.

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana tingkat Akuntabilitas oleh narasumber pada tahap Musrenbang apakah BAPPEDA memberikan kejelasan terhadap sasaran kebijakan yang telah disusun.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 dengan narasumber I menyatakan bahwa:

"Ya..kami memberikan kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah disusun."

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

"Ada..biasanya secara tertulis.."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Senin tanggal 17 Oktober menyatakan bahwa:

"Kadang-kadang ada kadang tidak juga..tapi mungkin saya yang tidak membacanya barang kali ya... hehe"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Rabu tanggal 19 Oktober menyatakan bahwa:

"BAPPEDA setau saya memberikan kejelasan sasaran dari kebijakan yang dibuat, cuma mungkin lambat dari yang di jadwalkan.."

Kinerja BAPPEDA dalam pelaksanaan tahapan Musrenbang sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, namun masih terdapat keterlambatan pelaksanaan Forum SKPD, hal ini disebabkan belum diperolehnya data usulan hasil musrenbang kecamatan.

Sedangkan untuk akuntabilitas kinerja BAPPEDA pada tahap ini juga cukup baik karena BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan dan dapat memberikan kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah disusun, namun masih perlu ditingkatkan pada forum Musrenbang Desa/Kelurahan, hal ini guna mencegah jangan sampai forum ini hanya

berupa daftar keinginan saja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.9.

6. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD,

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap mengacu pada rancangan RKP, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota juga memperhatikan rancangan RKPD Provinsi. Penyusunan rancangan akhir RKPD merupakan tanggung jawab Kepala BAPPEDA dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Tahunan Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsibilitas oleh narasumber pada tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD apakah sudah terlaksana sesuai jadwal,

Berdasarkan hasil wawancara pada Senin tanggal 17 Oktober 2011 menyangkut dengan pelaksanaan penyusunan akhir RKPD sesuai dengan jadwal dengan salah satu narasumber menyebutkan bahwa:

“Sepertinya rancangan akhir RKPD tidak selalu tepat waktu..kurang tau juga ada permasalahan apa sehingga rancangan RKPD akhir sering terlambat penyelesaiannya.”

Berdasarkan hasil wawancara pada Kamis tanggal 06 Oktober 2011 menyangkut dengan pelaksanaan penyusunan akhir RKPD sesuai dengan jadwal dengan salah satu narasumber menyebutkan bahwa:

“ya, dalam rancangan akhir RKPD terkadang tidak tepat waktu, ya, kurang tau juga apa permasalahannya yang membuat rancangan RKPD akhir sering terlambat.”

Berdasarkan hasil wawancara pada Jum'at tanggal 07 Oktober 2011 menyangkut dengan pelaksanaan penyusunan akhir RKPD sesuai dengan jadwal dengan salah satu narasumber menyebutkan bahwa:

“dalam rancangan akhir RKPD tidak selalu tepat waktu, ya, banyak permasalahan yang membuat rancangan RKPD akhir sering terlambat.”

Sebagaimana diketahui pelaksanaan penyusunan akhir RKPD seharusnya dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tetapi biasanya sering terjadi keterlambatan hingga beberapa bulan ke depan. Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara yang dilakukan pada Senin tanggal 10 Oktober 2011 kepada salah seorang narasumber yang menyebutkan bahwa:

“Penyusunan rancangan akhir belum terlaksana sesuai jadwal..jadwal yang ditetapkan harus diselesaikan pada minggu pertama bulan Juni, namun terkadang rancangan baru selesai pada akhir September.”

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

“Tidak terlaksana sesuai jadwal..sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian rancangan akhir RKPD.”

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana tingkat Akuntabilitas oleh narasumber pada tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD apakah BAPPEDA menyampaikan hasil Rancangan Akhir RKPD kepada SKPD. Selanjutnya disampaikan juga bahwa:

“Penyempurnaan dari rancangan akhir RKPD ini biasanya jarang kami sampaikan ke SKPD...mengingat ini hanya sekedar penyempurnaan saja..toh pembahasan dari musrenbang sudah lebih dari cukup untuk mengetahui perkembangan tentang rancangan RKPD.”

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

“Hmmm..gimana ya, sepertinya tidak..”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Senin tanggal 17 Oktober menyatakan bahwa:

“Harusnya disampaikan..karena ini menyangkut penyempurnaan dari rancangan RKPD awal dan sudah dibahas juga di musrenbang..”

Peran dan usaha Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan merumuskan perencanaan pembangunan sangat mutlak diperlukan. Seperti apa yang dikatakan oleh Sukirno (1982:116), bahwa ada 3 (tiga) aspek perlunya Pemerintah Daerah untuk secara aktif mengadakan perencanaan program pembangunan, yaitu:

- a. Untuk membantu pemerintah pusat dan pada waktu yang sama mengemukakan pendapatnya dalam meneliti proyek yang akan dilaksanakan di daerah,
- b. Untuk menciptakan desentralisasi yang aktif dan selanjutnya menciptakan administrasi yang lebih efisien,
- c. Untuk memberikan pengarahan pada sector swasta sehingga kegiatan investasi mereka dapat dilaksanakan secara efisien dan memberikan sumbangan yang maksimal terhadap pembangunan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber di atas maka dapat disimpulkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD diukur dengan Indikator Responsibilitas dan Akuntabilitas dapat dikategorikan kurang baik, hal ini disebabkan karena BAPPEDA dalam menyusun Rancangan Akhir RKPD sering mengalami keterlambatan yang seharusnya sudah diselesaikan minggu pertama bulan Juni tetapi kadang bisa diselesaikan beberapa bulan ke depan. Selain itu BAPPEDA juga tidak menyampaikan hasil Rancangan Akhir RKPD kepada SKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja SKPD sehingga SKPD, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.10.

7. Tahap Penyusunan Renja SKPD.

Renja SKPD merupakan penyempurnaan dari rancangan Renja SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD bersifat definitif.

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsibilitas oleh narasumber pada tahap Penyusunan Renja SKPD apakah yang akan

dilakukan SKPD jika BAPPEDA tidak menyampaikan hasil rancangan akhir RKP.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu narasumber pada Senin tanggal 10 Oktober 2011 tentang hal yang akan dilakukan SKPD jika BAPPEDA tidak menyerahkan rancangan akhir RKP menyebutkan bahwa:

“Biasanya SKPD tidak menyusun Renja SKPD, hal ini diketahui dari SKPD tidak menyampaikan Renja kepada BAPPEDA.

Penyempurnaan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada dokumen RKP yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali kerjasama dari BAPPEDA untuk bisa menyerahkan atau menginformasikan tentang rancangan akhir dari RKP tersebut. Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu narasumber pada Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa:

“Penyempurnaan renja SKPD merupakan tanggung jawab SKPD oleh karena itu menurut saya BAPPEDA harus memberikan hasil rancangan akhir kepada SKPD sehingga SKPD dalam membuat Renja SKPD dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah disusun.”

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana tingkat Akuntabilitas oleh narasumber pada tahap Penyusunan Renja SKPD bagaimana kaitannya dengan kebijakan yang telah dibuat pada RKP.

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

"Tentunya kebijakan atau program tersebut tidak terlaksana dengan optimal, karena bagaimanapun renja ini SKPD ini bersifat definitif."

Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS); dan menjamin semua *stakeholders* terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana mungkin hal ini akan terwujud jika SKPD tidak membuat Renja SKPD. PPAS merupakan program prioritas yang merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Renja SKPD diukur dengan Indikator Responsibilitas dan Akuntabilitas menunjukkan hasil yang kurang baik, hal ini disebabkan sehubungan dengan BAPPEDA tidak menyampaikan hasil Rancangan Akhir RKPDP kepada SKPD sehingga SKPD tidak melakukan penyusunan Renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD ini sangat diperlukan guna mengakomodir terhadap pelaksanaan program yang dirumuskan. Selain itu, karena SKPD tidak membuat Renja SKPD maka SKPD juga tidak

menyerahkan Renja SKPD kepada BAPPEDA sehingga hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran APBD tahun berkenaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.11.

8. Tahap Penyiapan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD.

Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD serta penyiapan dan penetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD, sehingga dokumen RKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Renja SKPD maupun kelanjutannya dalam proses penyusunan APBD, demikian pula dokumen Renja SKPD menjadi dokumen resmi sebagai rujukan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsibilitas oleh narasumber pada tahap Penyiapan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD apakah BAPPEDA tidak menyampaikan hasil Dokumen RKPD yang telah ditetapkan melalui SK Peraturan Kepala Daerah kepada SKPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu narasumber menyebutkan bahwa :

“Dokumen RKPD memang tidak disampaikan kepada SKPD, hal ini sebenarnya menurut kami sudah tidak perlu lagi disampaikan karena kita sudah memiliki rancangan persiapan, rancangan awal dan juga sudah ada musrenbang. Dari pembahasan di musrenbang sudah diketahui keputusan final dari RKPD.

Sehingga dari hasil tersebut kami menganggap SKPD sudah bisa membuat Renja tanpa menunggu dokumen akhir dari RKPD.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu narasumber menyebutkan bahwa :

“RKPD memang tidak disampaikan kepada SKPD, karena menurut kami tidak perlu lagi disampaikan, sebab kita sudah memiliki rancangan persiapan, rancangan awal dan juga sudah ada musrenbang. Dari pembahasan di musrenbang sudah diketahui keputusan final dari RKPD. Sehingga dari hasil tersebut kami menganggap SKPD sudah bisa membuat Renja tanpa menunggu dokumen akhir dari RKPD.”

Sebaiknya dokumen akhir rancangan RKPD diinformasikan kepada SKPD, karena hal ini berguna SKPD dalam pembuatan Renja SKPD masing-masing, selain itu hal ini juga menyangkut kepada penganggaran pada proyek atau kegiatan strategis yang direncanakan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang menyebutkan bahwa:

“BAPPEDA seharusnya menyangkut laporan akhir RKPD harus menyerahkan kepada SKPD, hal ini dimaksud agar SKPD dapat menyusun Renja SKPD tahun berkenaan, walaupun sudah ada rancangan persiapan sampai musrenbang tapi tetap akhir hasil perlu dilaporkan guna mewujudkan kelancaran pada pelaksanaan program kerja.”

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana tingkat Akuntabilitas oleh narasumber pada tahap Penyiapan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD Apakah SK Kepala SKPD tentang Renja SKPD akan ditetapkan sehubungan dengan tidak dibuatnya Renja SKPD.

Selanjutnya narasumber tersebut menambahkan:

"Mana mungkin akan ditetapkan..Renja SKPD nya saja tidak ada..gimana toh??"

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

"Pastinya SK tentu tidak dapat di tetapkan."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pada Senin tanggal 10 Oktober menyatakan bahwa:

"Ya tentu tidak.."

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas disimpulkan bahwa kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyiapan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD diukur dengan Indikator Responsibilitas dan Akuntabilitas adalah rendah, hal ini sehubungan dengan tidak disampaikannya hasil Dokumen RKPD oleh BAPPEDA sehingga SKPD tidak membuat Renja mereka, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.12.

9. Tahap Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah.

Tahap Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu: penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan RAPBD.

Penyusunan KUA dan PPAS, serta penyusunan RKA-SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana ke dalam penganggaran yang disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan para pemangku kepentingan atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja SKPD dengan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.

Untuk mengukur sejauhmana tingkat Responsibilitas oleh narasumber pada tahap Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah apakah sering terjadi keterlambatan penyusunan KUA dan PPAS.

Selanjutnya, berkaitan dengan tahap pengintegrasian ini hasil wawancara yang penulis peroleh berkaitan dengan apakah penyusunan KUA dan PPAS sering mengalami keterlambatan menyebutkan bahwa :

"Kita sudah berusaha maksimal membuat KUA dan PPAS, tapi jika terjadi keterlambatan menurut saya itu bukan hal yang disengaja, karena prosedur yang harus dijalani membuat kami demikian."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu narasumber menyebutkan bahwa :

"Prosedur memang harus dijalankan, tetapi waktu juga harus dipertimbangkan..agar semuanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien."

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana tingkat Akuntabilitas oleh narasumber pada tahap Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses

Penganggaran Daerah apakah program kerja dapat terlaksana dengan baik jika KUA dan PPAS tidak terlaksana tepat waktu.

Selanjutnya narasumber tersebut menambahkan:

“Mana mungkin akan ditetapkan..Renja SKPD nya saja tidak ada..gimana toh??”

Berdasarkan hasil wawancara Rabu tanggal 5 Oktober 2011 yang dilakukan kepada narasumber II menyatakan bahwa:

“Ga mungkin...”

Musyawarah Perencanaan Pembangunan setiap tahun dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi daerah, berdasarkan prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. Untuk menghasilkan Rencana Kerja (Renja) SKPD berdasarkan prioritas menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dibentuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi BAPPEDA untuk menyampaikan hasil RKPD akhir tersebut guna menunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas disimpulkan bahwa kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah diukur dengan Indikator Responsibilitas adalah rendah, karena terjadinya

keterlambatan penyusunan KUA dan PPAS dari jadwal sesuai aturan yang ditetapkan, hal ini diakibatkan dari terlambatnya penyusunan Rancangan Akhir RKPD, disamping itu juga dalam penyusunan APBD terjadi keterlambatan dalam pengesahannya karena adanya tahapan pembahasan dan verifikasi dari pihak Provinsi dengan waktu yang sudah melewati jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Untuk akuntabilitas kinerja BAPPEDA pada tahap ini juga disimpulkan rendah, hal ini sehubungan dengan dalam Penyusunan KUA dan PPAS terjadi perubahan beberapa program dan kegiatan yang disesuaikan disaat penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan APBD, seharusnya KUA dan PPAS adalah dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan APBD, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.13.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Sebagaimana yang diungkap oleh Steers (1985) maupun Siagian (1986), bahwa kinerja organisasi tidak terlepas dari pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internal sangat terkait dengan faktor-faktor dalam manajemen organisasi tersebut, seperti misalnya, pegawai, sarana dan prasarana pendukung, serta prosedur kinerja dalam pelaksanaan tugas yang diemban. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar jangkauan kewenangan organisasi tetapi berpengaruh terhadap kinerja.

Dari hasil kajian teori dan wawancara dengan narasumber ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal.

a. Sumberdaya Manusia.

Berdasarkan hasil kajian teori pada Bab II dan rangkuman wawancara dengan narasumber, sumberdaya manusia sangat mempengaruhi kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam konteks melaksanakan tugas dan fungsinya pada Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu: 1) kuantitas, (2) pemahaman terhadap tugas dan fungsinya, 3) kemampuan melakukan analisis, dan 4) pemahaman dan ketaatan pada peraturan dan prosedur yang berlaku.

Salah satu hambatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah sumberdaya manusia yang terbatas. Tingkat pendidikan merupakan indikator pengukuran kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai, dan kemampuan yang di peroleh dari tingkat pendidikan pegawai akan memberi corak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. sebab semakin tinggi tingkat pendidikan yang di miliki pegawai maka akan efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan.

Gambaran tingkat pendidikan dan jumlah pegawai pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana pada lampiran tabel 4.1 tersebut.

Dari tabel tersebut diatas terlihat gambaran bahwa tingkat pendidikan sarjana memiliki prosentase terbesar yaitu 70%, sedangkan sisanya 30% dengan tingkat pendidikan SLTA.

Dengan kondisi demikian, seharusnya dapat dijadikan barometer dalam mengelola organisasi dan meningkatnya kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 11.605,97 KM², yang terdiri dari 20 kecamatan dan 192 desa/kelurahan, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir yang jumlah total 50 orang saja, maka pada saat musyawarah pembangunan tingkat desa, kuantitas pegawai dirasakan belum cukup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, BAPPEDA Kabupaten seharusnya membentuk tim kinerja dan dalam pelaksanaannya bisa berkerjasama dengan BPS, lembaga penelitian atau perguruan tinggi.

Dari hasil pengamatan, pemahaman pegawai BAPPEDA terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku masih kurang, akibatnya terjadi ketidaktaatan terhadap prosedur dan ketentuan yang

berlaku. Hal ini terlihat masih banyak pegawai BAPPEDA yang tidak mempunyai dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaannya BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir hanya bekerjasama dengan Kantor BPS saja, sedangkan lembaga penelitian atau perguruan tinggi tidak dilibatkan, seharusnya untuk mengatasi kendala sumberdaya manusia (kualitas dan kuantitas) mereka harus dilibatkan.

b. Sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, apabila tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka akan sulit mencapai kinerja yang maksimal. Sarana dan prasarana ini bisa berupa tempat untuk pelaksanaan kegiatan juga bisa berupa penunjang untuk kegiatan, misalnya computer untuk mengolah data, sarana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan yang lokasinya berjauh dengan kantor BAPPEDA.

Sarana dan prasarana yang dimiliki BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dilihat secara umum cukup memadai, saat ini BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki gedung kantor yang cukup representatif sendiri. BAPPEDA bisa menggunakan

prasarana ini dengan maksimal sehingga pegawai merasa nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sarana lain penunjang tugas BAPPEDA adalah komputer, baik *hardware* maupun *software*, yang menjadi masalah adalah penggunaan fasilitas ini. Masih terbatasnya kemampuan para pegawai untuk menggunakan komputer sehingga dalam pengolahan data mengalami hambatan yang mengakibatkan keterlambatan tugas-tugas seperti analisa data dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. BAPPEDA perlu memaksimalkan fungsi komputer yang dimilikinya dengan meningkatkan kemampuan pegawainya dalam mengoperasikan komputer, khususnya yang berkaitan dengan analisis data perencanaan, antara lain Geografichal Information System (GIS). Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan dan mendatangkan ahlinya, sehingga akan banyak pegawai yang bisa mengikuti pelatihan, hal ini berbeda apalagi mengirim pegawai mengikuti pelatihan ditempat lain, perlu biaya yang relatif besar dan pesertanya sangat terbatas, sehingga begitu sarana komputer ini bisa dimanfaatkan dengan optimal.

Sedangkan sarana transportasi relatif belum mencukupi, hal ini tergambar pada saat pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, dengan 192 desa/kelurahan dan luas jangkauan wilayah 11.605,97 KM², pegawai BAPPEDA masih merasakan kekurangan sarana transportasi untuk melaksanakan kegiatan di desa. Untuk mengatasi

masalah ini BAPPEDA bisa mengusulkan menambah sarana transportasi kepada pemerintah daerah guna kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Faktor-faktor Eksternal.

a. Hubungan dengan SKPD.

BAPPEDA dan SKPD akan selalu berhubungan, hal ini bukan saja kedudukan BAPPEDA memiliki fungsi perencanaan sebagai koordinator perencanaan pembangunan akan melibatkan SKPD baik dalam melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah, karena SKPD mengelola kegiatan dalam satu wilayah baik di Ibukota Kabupaten maupun berada di Desa/Kelurahan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, konteks hubungan dengan SKPD itu berupa :

(a) koordinasi, yaitu kemampuan BAPPEDA dalam berkoordinir dalam melaksanakan kegiatan, dan (b) kualitas data yang diajukan oleh SKPD kepada BAPPEDA untuk diolah menjadi produk perencanaan yang lebih maksimal.

b. Hubungan dengan DPRD.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BAPPEDA dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Pada tahap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, DPRD menilai dan memberikan masukan pada penentuan : (1) tujuan dan arah pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, (2) sasaran pembangunan daerah, (3) penentuan skala prioritas, dan (4) strategi dan kebijakan tahunan.

Secara umum hubungan dengan DPRD telah dilaksanakan dengan baik, menurut narasumber dari DPRD, anggota DPRD telah dilibatkan mulai dari musyawarah pembangunan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Kondisi ini perlu diperhatikan agar hubungan pihak antara legislatif dan eksekutif tetap harmonis.

c. Partisipasi masyarakat.

Hasil pembangunan merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan partisipasi aktif masyarakat, dimulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap implementasi hasil rencana. Dalam konteks Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, partisipasi masyarakat adalah berupa : (a) sumber daya masyarakat di desa, hal ini erat kaitannya dengan penyampaian usulan mereka pada saat Musyawarah Pembangunan tingkat Desa dan Kecamatan, (b) partisipasi swasta, hal ini akan berpengaruh terhadap penyusunan uraian dan perkiraan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh swasta/swadaya masyarakat.

Salah satu tahapan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah pada tahap perumusan usulan program proyek secara terpadu, yaitu pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa (Musrenbangdes). Masyarakat terlibat langsung dalam menentukan usulan program/kegiatan, namun akibat keterbatasan sumberdaya manusianya, BAPPEDA kesulitan dalam menjelaskan maksud dan tujuan dari hasil tahap evaluasi dan analisa keadaan serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat yaitu pada saat Musyawarah Pembangunan tingkat Desa namun hasilnya masih berupa daftar keinginan saja. BAPPEDA perlu mengadakan pelatihan Penyusunan

Usulan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kepada masyarakat terutama aparat pemerintah desa. Karena pertemuan pada saat Musyawarah Pembangunan tingkat Desa masih kurang optimal.

d. Ketersediaan dana pembangunan.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada tahap perumusan usulan program proyek secara terpadu tergantung dengan ketersediaan dana pembangunan. Ini disebabkan karena pembangunan di Indonesia masih berorientasi pada anggaran yang ada (*budget oriented*) bukan pada penekanan pada program kerja yang ada (*program oriented*). Salah satu kendala dalam pembangunan di daerah adalah, usulan program/kegiatan yang menyesuaikan kepada dana yang tersedia, bukan dana yang menyesuaikan dengan program/kegiatan yang telah disusun. Sehingga banyak usulan dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan, oleh sebab itu BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir harus menggunakan pendekatan skala prioritas yang sudah disusun pada tahap evaluasi dan analisa keadaan serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah dalam menentukan program/kegiatan.

Pemerintah Daerah sangat kesulitan dalam menentukan atau menyesuaikan usulan program/kegiatan. hal ini disebabkan keterbatasan dana pembangunan dibandingkan dengan usulan program/kegiatan yang dibuat, akibatnya banyak muncul

ketidakpuasan dari sebagian masyarakat yang usulanya tidak dapat dilaksanakan.

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, hasil dan usulan rencana pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang diolah BAPPEDA, terdapat yang sangat besar antara usulan rencana dengan dana pembangunan yang tersedia. Usulan rencana memerlukan dana sebesar Rp.2.945.743.555.984,00 sedangkan dana yang tersedia adalah sebesar Rp.1.046.489.759.609.06, sehingga dana yang tersedia 35,53% saja. Akibat kekurangan dana ini BAPPEDA kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan-temuan dari hasil penelitian Kinerja BAPPEDA dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari indikator responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas belum sepenuhnya terlaksana.

Secara umum berdasarkan fakta yang ada Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diukur dari Indikator Responsivitas rendah, karena daya tanggap atau kepekaan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat, dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat, karena dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap program/kegiatan yang disusun BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir, sehubungan dengan terbatasnya dana yang tersedia untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Begitu juga halnya dengan Indikator Tanggung Jawab diukur sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari ketaatan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengikuti tahapan-tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, seperti yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, masih terlambatnya jadwal yang dilakukan sesuai dengan aturan, sedangkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip kebijaksanaan organisasi sudah dipenuhi dan kesesuaian antara program dan pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur organisasi.

Untuk Indikator Akuntabilitas, diukur masih rendah, hal ini dapat dilihat proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar karena tidak disampaikannya dokumen RKPD kepada SKPD sehingga akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program dan kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil tidak dikomunikasikan.

Dari beberapa indikator tersebut diatas, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Faktor Internal.

- a. Terbatasnya kemampuan Sumberdaya Manusia yang ada di BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah hanya bekerjasama dengan Kantor BPS saja, sedangkan lembaga penelitian atau perguruan tinggi tidak dilibatkan, seharusnya untuk mengatasi kendala sumberdaya manusia (kualitas dan kuantitas) mereka harus dilibatkan.

b. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai, masalahnya adalah dalam penggunaan fasilitas yang terbatas, karena kemampuan sumberdaya manusia yang belum optimal, di samping itu juga luasnya wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengumpulan data tidak dapat dipenuhi secara maksimal karena terbatasnya personil yang ada.

2. Faktor Eksternal.

- a. BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir saling koordinasi terhadap kegiatan yang diusulkan sehingga diperlukan kualitas data dari SKPD untuk diolah menjadi produk perencanaan berkesinambungan.
- b. Hubungan dengan DPRD telah dilaksanakan dengan baik, hal ini telah dilibatkan mulai dari musyawarah pembangunan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- c. Partisipasi masyarakat yaitu pada saat Musyawarah Pembangunan tingkat Desa namun hasilnya masih berupa daftar keinginan saja. BAPPEDA sehingga apa yang diusulkan masih kurang optimal.
- d. Pemerintah Daerah sangat kesulitan dalam menentukan atau menyesuaikan usulan program/kegiatan, hal ini disebabkan keterbatasan dana pembangunan dibandingkan dengan usulan program/kegiatan yang dibuat, akibatnya banyak muncul ketidakpuasan dari sebagian masyarakat yang usulannya tidak dapat dilaksanakan.

B. Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat mengemukakan saran, baik saran secara teoritis maupun saran secara praktis, agar kedepan diharapkan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir lebih baik lagi dan akhirnya diharapkan juga Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat bermanfaat bagi SKPD dalam menyusun Kebijakan Pembangunan Daerah maupun masyarakat dapat merasakan pembangunan yang menjadi harapan dan usulan.

1. Saran Teoritis.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini telah menemukan fakta bahwa Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir diukur dari Indikator Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih rendah, karena RKPD tidak disampaikan kepada SKPD, padahal dokumen ini penting dalam menyusun Rencana Kerja SKPD yang sinergis, disamping itu masih tidak tepat waktu terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Maka untuk mengembangkan ilmu yang sesuai dengan konsep dan teori yang ada bila di kaitkan dengan temuan fakta yang di ketemukan di lapangan agar BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan perlu dilakukan peningkatan mutu sumber daya manusianya di bidang perencanaan.

2. Saran Praktis.

Kepada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyusunan program-program tahunan yang

berkesinambungan dan terkoordinasi, dengan melihat berbagai indikator sebagai berikut :

- a. Melihat dari hasil penelitian ini, maka dari Indikator Responsivitas yang perlu dioptimalkan dan ditingkatkan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih tanggap dan peka dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat, dengan menyusun program dan kegiatan prioritas lebih terarah sehingga masyarakat dapat merasakan apa yang diusulkan bisa diakomodir.
- b. Jika dilihat dari Indikator Responsibilitas, BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir harus konsisten terhadap tahapan-tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sehingga program dan kegiatan sinergis.
- c. Sedangkan pada Indikator Akuntabilitas BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir harus melaksanakan prinsip-prinsip administrasi yang benar, sehingga dengan adanya dokumen merupakan informasi yang jelas sehingga sasaran kebijakan yang akan disusun saling keterkaitan.
- d. Adapun untuk mengatasi beberapa faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini dengan :
 - a) Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian maupun perguruan tinggi pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, strategi ini dalam rangka mengatasi terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia yang tersedia.

- b) Peningkatan Sumberdaya Manusia, strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf, melalui :
- 1) Penyelenggaraan kursus dan diklat fungsional yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.
 - 2) Mengikuti tugas belajar dengan konsentrasi pada bidang perencanaan dan manajemen pembangunan.
- c) Peningkatan fungsi organisasi, strategi ini dimaksudkan dalam rangka perkuatan koordinasi lintas sektor dengan SKPD sektoral untuk mendapatkan data dan informasi yang berkualitas sebagai masukan untuk pembuatan rencana yang lebih makro, dan hubungan koordinasi dengan DPRD, agar tercipta koordinasi dan menjalin kerjasama yang baik.
- d) Peningkatan organisasi, strategi ini diarahkan untuk menyempurnakan perangkat manajemen, yaitu ; dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.
- e) Strategi peningkatan partisipasi masyarakat, strategi ini untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu dengan cara ;
- 1) Melaksanakan diklat perencanaan bagi masyarakat agar pengetahuan tentang perencanaan dapat diaplikasikan.
 - 2) Sosialisasi penyusunan perencanaan kepada masyarakat, sehingga diperoleh saran dan masukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar A. Prabu Mangkunegara (2005). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Argyris, Christ, 1968, *Organizational Effectiveness in David L. Sillis, International Encyclopedia of Social Science*, The Mac Millian and The Fress Press, New York.
- Arief M, Merriem. S. 1985, *Organisasi Manajemen*, Karunia dan UT, Jakarta.
- Bintoro, Tjokroamidjoyo, 1976, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Penerbit PT. Toko Gunung Agung.
- Bryan, Llyod & Lesliw Rue.(1981) *Human Resource and Personel Management*, Illinois:Richard D. Irving.Inc.
- Branch, Melville C., 1983, *Comprehensive Planning California : General Theory adn Priciples*, Pilasades Publisher.
- Bryant, Corralie and Lousise G. White, 1989, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, terjemahan Rusyanto J, Simatupang, LP3ES, Jakarta.
- Budihardjo, Eko, 1995, *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Davey, Kenneth, 1993, *The Institutional Framework for Planning, and the role of local government*, deited by Nick devas and carole Rakodi, Managing fast growing cities, 1 st Published, Longman Scientific and Techincal, Copublished in the United States With John Wiley & Sons, inc New York.
- Dwiyanto, Agus, 1995: *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Yogyakarta, Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Easton, Joseph, W, 1986 *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional : dari konsep ke aplikasi (terjemahan : institution building and development : from concept to application, oleh Pandan Guritno dan Aldi Jeni)*, UI Press, Jakarta.
- Etzioni, Amitai, 1985, *Organisasi-organisasi Modern*, terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Ghalib, Rusli, 2005, *Ekonomi Regional*, Bandung, Pustaka Ramadhan.

- Harry, H.P, 1989, *Demirmining the effectiveness of government services*, in James L Perry, Handbook of public administration, San Francisco, CA. Jossey-Bass Publishers.
- Hermanislamet, B, 1993, *Desentralisasi Perencanaan Pembangunan dan otonomi Daerah Forum Perencanaan Pembangunan*, Volume 1 Nomor 2 Desember 1993, Penerbit Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional, UGM, Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad, dkk, 199, *Modul perencanaan pembangunan wilayah (Planning of regional development programmes-PRDP)*, LAN RI – DSE Jerman, Jakarta.
- Koswara, S., 1992. *Kebijaksanaan Perencanaan daerah dan Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam modul program pelatihan Teknik dan Manajemen Pembangunan (TMPP)*, UGM, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2002, *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri*, Yogyakarta, UUP AMP YKPN.
- Lawless, David J., 1972, *Approach*, Pretince Hall Inc., Englewceed Cliffs New Jersey.
- Lenvine, Charles H, 1990, *Public administration, Challenges, Choices, Consequences*, Scott Forman/Little Brown Higher Education: Glenview, Illinois.
- Lewis W. Arthur, 1986, *Perencanaan Pembangunan, dasar-dasar Kebijakan Ekonomi*, Cetakan 1, Aksara baru, Jakarta.
- Lofland, John and Lofland I.H, 1984, *Analyzing Social Setting : A. Guide to Quantitative Observation and Analysis*, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Cetakan ke-1, Jogjakarta.
- Rangkuti, Freddy, 1997, *Analisis SWOT : Teknik membedah kasus bisnis, Reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21*, Gramedia Pustaka utama, 1997.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. *.Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah..* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Miftah Thoha, 1993. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, Jakarta: Raya Srafindo Pustaka.

- Muhadjir Noeng, 1993, *Metodologi penelitian kualitatif, telaah positivistic, rasionalistik, fenomenologik, realisme Metaphisik*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nystorm and Sturbuck, ed. 1981. *Hand Book of Organization Design*. Oxford : University Press.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sitanggang, H, 1999, *Perencanaan Pembangunan*, Pustaka sinar harapan, Jakarta.
- Sjafrizal, 2009, *Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*, Cetakan Pertama Oktober 2009, Penerbit Praninta Offset.
- Steers, Richard M, 1980. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Tinbergen, J. 1987. Input-Ouput Analysis in Education. Dalam Psacharopoulos, G. Ed. 1987. *Economics of Education: Research and Studies*. New York : Pergamon Press.
- Thoha, Miftah, 1988, *Perilaku Organisasi*, Rajawali Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintaro dan Mustofa Adidjoyo. 1988. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Warpani, Suwardjoko, 1984, *Analisis Kota & Daerah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Wexley, K.N., Yukl, G.A., 1977, *Organizational Behavior and Personal Psychology*, Richard D.Irwin Inc., Homewood, Illinois.
- Wursanto, I.G.(1987). *Dasar-Dasar Manajemen Personalia*. Pustaka Dian, Jakarta.

MAKALAH

- Dwiyanto, Agus, 1995, *Penilaian kinerja organisasi publik, makalah dalam seminar sehari: kinerja organisasi publik, kebijakan dan penerapannya*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- BAPPENAS, 2004, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009*, Jakarta.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS, 2008, *Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009, Bersama Menata Perubahan*, Jakarta.

Solichin, Dadang, 2008, *Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan (Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah di Bali, tanggal 26 April 2008)*, Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 08 Tahun 2008 Tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 Tentang *Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2006, Tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat*, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 tahun 2008 tanggal 21 November 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*.

HASIL PENELITIAN/TESIS.

Arafat, Yaser., 2002, *Evaluasi Kinerja BAPPEDA Kabupaten Barito Utara pada Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah*, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Askuri, 2002, *Analisis Kinerja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah* Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Efendi, Ahmad, 2011, *Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada BAPPEDA Kota Semarang)* Tesis Program Pascasarjana Universitas STIKUBANK, Semarang).

Effendi, Sopian, dkk, 1992, *Evaluasi kemampuan BAPPEDA tingkat II dalam menyongsong Pelita VI*, Laporan penelitian, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Saiful, 2011, *Proses Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Birem Bayeun pada BAPPEDA Aceh Timur*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Jakarta.

Samsul Rizal, 2011, *Partisipasi Publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Jakarta.

Syaifullah, 2008, *Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (studi kasus perencanaan pembangunan tahun 2007)* Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN

**Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi per Desember 2010)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)			%
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pasca Sarjana (S2)	8	1	9	18
2	Sarjana (S1)	19	5	24	48
3	Diploma	1	1	2	4
4	SLTA	10	5	15	30
	Jumlah	38	12	50	100

Sumber : Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel 4.2 Komposisi PNS Menurut Pangkat/Golongan Ruang
(Kondisi Desember 2010)**

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)	
		Laki-laki	Perempuan
I.	Pembina Utama (IV/c)	1	-
	Pembina Tk I (IV/b)	1	-
	Pembina (IV/a)	4	-
II.	Penata Tk I (III/d)	3	1
	Penata (III/c)	6	1
	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	3
	Penata Muda (III/a)	10	2
III.	Pengatur Tk. I (II/d)	1	-
	Pengatur (II/c)	2	1
	Pengatur Muda (II/a)	7	4
	<i>Jumlah Keseluruhan</i>	38	12

Sumber : Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

LAMPIRAN

**Tabel 4.2. Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda
(Kondisi Desember 2010)**

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung	7 ruangan	1 Ruang kepala 5 Ruang Set/Kabid 5 Ruang Kerja
			1 Ruang Aula
			1 Gudang
			1 Mushalla
			1 Ruang Bendahara
2.	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Roda 4	6 buah	
	- Kendaraan Roda 2	20 buah	
3.	Komputer Laptop	9 buah	
4.	Personal Computer	19 buah	
5.	Mesin Ketik Manual	2 buah	
6.	AC	13 buah	

1	2	3	4
7.	TV Berwarna	2 buah	
8.	LCD Proyektor	1 buah	
9.	LCD Proy Portabel	1 buah	
10.	Layar LCD Motoriz	1 buah	
11.	Layar LCD Tripod	1 buah	
12.	Proyektor	1 buah	
13	Tiang Proyektor	1 buah	
14	Scanner	1 buah	
15	Tustel	1 buah	
16	Kamera Digital	4 buah	
17	Handycam	4 buah	
18	Rak Buku	6 buah	
19	Brankas	5 buah	
20	Filling Cabinet	8 buah	
21	Almari Kayu / Besi	14 buah	
22	Meja kursi Tamu	4 seat	
23	Meja Kerja	37 buah	

1	2	3	4
24	Kursi Kerja	52 buah	
25	Meja Rapat	10 buah	
26.	Kursi rapat	17 buah	
27	Jam dinding	2 buah	
28	White board	1 buah	
29	Printer	24 buah	
30	Pesawat Telepon	9 buah	
31	Fax	2 buah	
32.	Kursi Lipat	50 buah	
33.	Kursi rapat	17 buah	
34.	Jack speaker	2 buah	
35.	Jack Mic	8 buah	
36.	Efek fokal	1 buah	
37	Equalizer	1 buah	
38	Mic Podium Vision	3 buah	
39	Cabel Duk	1 buah	
40	Cabel speaker	2 buah	

1	2	3	4
41	Hand speaker	2 buah	
42	Spekear Osso	1 buah	
43	UPS	4 buah	
44	Culkas	1 buah	
45	Penyedot Asap	8 buah	
46	Power Amply	1 buah	
47	Mixer	1 buah	
48	Jam dinding	2 buah	
49	White Boar	1 buah	
50	Pesawat Telepon	2 buah	
51	Fax	2 buah	
52	Printer	24 buah	

Tabel 4.3. Kinerja BAPPEDA pada proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir

No	Proses Penyusunan RKPD	Respon- sivitas	Respon- sibilitas	Akun- tabilitas
1	2	3	4	5
I.	Persiapan Dan Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan.			
1.	Orientasi mengenai RKPD.			
2.	Identifikasi para pemangku kepentingan.			
3.	Pembentukan Tim Penyusun RKPD.			
4.	Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen.			
5.	Pengumpulan Data dan Informasi.			
6.	Penyusunan Daftar Isi RKPD.			
II.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD.			
1.	Rancangan Awal RKPD menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD			

1	2	3	4	5
	untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPd berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.			
III.	Penyusunan Rancangan Renja SKPD.			
1.	Persiapan Penyusunan.			
2.	Analisis dan Pengkajian Dokumen terkait.			
3.	Penyusunan Rancangan Renja SKPD.			
IV	Penyusunan Rancangan RKPd.			
1.	Penilaian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan kepala SKPD kepada BAPPEDA.			
V.	Musrenbang.			
1.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan.			
2.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan.			
3.	Pelaksanaan Forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota.			
4.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.			

1	2	3	4	5
5.	Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi.			
6.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi.			
7.	Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD).			
VI.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.			
1.	Penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang Tahunan Daerah,			
VII.	Penyusunan Renja SKPD.			
1.	Penyempurnaan dari rancangan Renja SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/ kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD bersifat definitif.			

1	2	3	4	5
VIII.	Penyiapan Dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tentang RKPD Dan Peraturan Kepala SKPD Tentang Renja SKPD.			
1.	Penyiapan dan Penetapan PERKADA.			
2.	Penyiapan dan Penetapan PERKA SKPD.			
IX.	Pengintegrasian RKPD Ke Dalam Proses Penganggaran Daerah			
1.	Penyusunan KUA dan PPAS.			
2.	Penyusunan RKA-SKPD.			
3.	Penyusunan RAPBD.			

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

Tabel 4.5. Analisis Kinerja Bappeda Pada Tahap Persiapan dan Pengorganisasian para Pemangku Kepentingan

NO	URAIAN KEGIATAN	SEHARUSNYA	REALITA	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1.	Orientasi mengenai RKPD.	Kesamaan pemahaman merupakan salah satu syarat pencapaian kesepakatan untuk tujuan bersama. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan orientasi bagi pihak-pihak yang terkait, baik yang menyangkut proses dan pendekatan perencanaan maupun berkaitan dengan substansi perencanaan itu sendiri.	Pemahaman pendekatan perencanaan melalui rapat-rapat internal BAPPEDA.	Sudah terlaksana dengan cukup baik, hanya dalam melibatkan pemangku kepentingan seperti unsur asosiasi/LSM, unsur perguruan tinggi ataupun SKPD perlu ditingkatkan lagi.

1	2	3	4	5
2.	Identifikasi para pemangku kepentingan.	Identifikasi para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari unsur mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan RKPD.	Identifikasi unsur tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ormas dan LSM yang akan diundang saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.	
3.	Pembentukan Tim Penyusun RKPD.	Tim penyusun sebaiknya juga melibatkan unsur para pemangku kepentingan di luar BAPPEDA, misalnya unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/LSM, dan unsur SKPD lain yang sangat terkait dengan kepentingan RKPD. Untuk lebih efektifnya kerja tim, maka tim penyusun dibagi dalam kelompok-kelompok kerja (POKJA).	Tim Penyusun hanya melibatkan unsur Bidang dan Staf dalam lingkup BAPPEDA.	

1	2	3	4	5
4.	Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen.	Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metoda pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan.	Menyusun Matrik Kegiatan mengenai tahapan dan penanggung jawab.	
5.	Pengumpulan Data dan Informasi.	Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.	Bekerjasama dengan BPS Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sumber data dan informasi.	

1	2	3	4	5
6.	Penyusunan Daftar Isi RKPD.	<p>Data/ informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.</p> <p>Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD.</p>	Dokumen RKPD mengikuti sistematika PP No.8 Tahun 2008.	

1	2	3	4	5
		Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.		

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.6. Analisis Kinerja Bappeda Pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

NO	URAIAN KEGIATAN	SEHARUSNYA	REALITA	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1.	Rancangan Awal RKPD menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD.	Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.	Review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu yang belum terakomodir pada tahun berkenaan dengan melibatkan bidang-bidang perencana pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.	Bahwa Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD sudah cukup baik, namun yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan tahap ini adalah data disajikan belum tepat waktu.

1	2	3	4	5
	Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.			Dan terkadang data tersebut tidak diberikan kepada SKPD sehingga SKPD kesulitan dalam menyusun perencanaan.

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.7. Analisis Kinerja Bappeda Pada Tahap Penyusunan Rancangan Renja SKPD

NO	URAIAN KEGIATAN	SEHARUSNYA	REALITA	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1.	Persiapan Penyusunan.	Penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi APBD (awal Desember)	Menyurati SKPD untuk melakukan penyusunan Rancangan Renja SKPD.	Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Rancangan Renja SKPD ini menunjukkan hasil yang cukup baik
2.	Analisis dan Pengkajian Dokumen terkait.	Pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait langsung dengan penyusunan Renja SKPD dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatan SKPD. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima.	SKPD berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam Penyusunan Rancangan Renja SKPD.	

1	2	3	4	5
3.	Penyusunan Rancangan Renja SKPD.	Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari BAPPEDA.	SKPD berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam Penyusunan Rancangan Renja SKPD.	

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.8. Analisis Kinerja Bappeda Pada Tahap Penyusunan Rancangan RKPD

NO	URAIAN KEGIATAN	SEHARUSNYA	REALITA	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1.	Penilaian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan kepala SKPD kepada BAPPEDA.	Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.	Rancangan Renja SKPD masing-masing SKPD dilakukan rekapitulasi dan sinkronisasi terhadap Rencana Program dan Kegiatan Prioritas.	Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Rancangan SKPD sudah cukup baik, penyusunan Rancangan RKPD merupakan hasil rekapitulasi dan sinkronisasi terhadap Rencana Program dan Kegiatan Prioritas.

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

Tabel 4.9. Analisis Kinerja Bappeda Pada Tahap MUSRENBANG

NO	URAIAN KEGIATAN	SEHARUSNYA	REALITA	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan.	Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan tingkat desa/ kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang desa/ kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah, dan difasilitasi/ disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala BAPPEDA.	Musrenbang Desa/Kelurahan dihadiri oleh Camat, hasilnya sebagai bahan Musrenbang Kecamatan, sedangkan unsur BAPPEDA tidak hadir dalam pelaksanaannya.	pelaksanaan tahapan Musrenbang sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

1	2	3	4	5
2.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan.	Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota.	Musrenbang kecamatan difasilitasi oleh pihak kecamatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa/Kelurahan dan sebagai narasumber BAPPEDA dan beberapa SKPD yang terkait.	
3.	Pelaksanaan Forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota.	Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD.	Melakukan inventarisasi usulan Kecamatan dan SKPD, dilakukan pembahasan oleh SKPD terkait mengenai program/kegiatan prioritas, pelaksanaan forum terlambat, hal ini disebabkan belum diperolehnya data usulan hasil musrenbang kecamatan.	

1	2	3	4	5
4.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.	Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPd kabupaten/kota berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPd.	Melakukan pembahasan bersama SKPD dan Kecamatan terhadap usulan program/kegiatan prioritas, dan melakukan inventarisasi usulan berdasarkan sumber pendanaannya.	
5.	Pelaksanaan Forum SKPD/ Gabungan SKPD Provinsi.	Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara	Pembahasan difasilitasi oleh Provinsi yang dihadiri oleh SKPD Provinsi terkait bersama BAPPEDA Kabupaten dalam rangka pembahasan usulan program/kegiatan prioritas bersumber dari dana APBD I, sharing dana dan program.	

1	2	3	4	5
6.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi.	<p>prioritas kegiatan pembangunan hasil forum musrenbang kabupaten/ kota dengan rancangan renja SKPD Provinsi yang bersumber dari Renstra SKPD Provinsi.</p> <p>Musrenbang provinsi adalah musyawarah pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk menyempurnakan rancangan RKPD provinsi berdasarkan masukan hasil forum SKPD Provinsi dan hasil musrenbang kabupaten/kota.</p>	<p>Menyusun kesepakatan Bupati bersama SKPD Provinsi terhadap kegiatan APBD I dan sharing program dan dana.</p>	
7.	Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD)	<p>Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD/Renja SKPD juga dilakukan melalui serangkaian Diskusi Kelompok Terfokus (FGD/ Focus Group Discussion).</p>	<p>Pihak Kabupaten tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Diskusi Kelompok terfokus.</p>	--

1	2	3	4	5
		Diskusi kelompok terfokus bertujuan untuk mempertajam substansi Rancangan RKPD/Renja SKPD berdasarkan analisis dan kesepakatan para pemangku kepentingan yang ahli/ berpengaruh.		

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.10. Analisis Kinerja Bappeda Pada Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

NO	URAIAN KEGIATAN	SEHARUSNYA	REALITA	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1.	Penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang Tahunan Daerah,	Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap mengacu pada rancangan RKP, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota juga memperhatikan rancangan RKPD Provinsi.	Melakukan kesepakatan bersama SKPD terhadap hasil Musrenbang sesuai dengan pagu dana yang tersedia, namun dalam pelaksanaan tidak tepat waktu (minggu kedua September), seharusnya telah disusun pada minggu pertama Bulan Juni, hasil rancangan akhir RKPD tidak disampaikan kepada SKPD hanya sebagai dokumen perencanaan untuk penyusunan KUA dan PPAS.	

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

Tabel 4.11. Analisis Kinerja Bappeda Pada Tahap Penyusunan Renja SKPD

NO	URAIAN KEGIATAN	SEHARUSNYA	REALITA	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1.	Penyempurnaan dari rancangan Renja SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/ kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD bersifat definitif.	Penyempurnaan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada dokumen RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.	SKPD tidak membuat dan menyampai kan Renja SKPD kepada BAPPEDA.	Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Penyusunan Renja SKPD menunjukkan hasil yang kurang baik

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

Tabel 4.12. Analisis Kinerja Bappeda Pada Tahap Penyiapan Dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tentang RKPD dan Peraturan Kepala SKPD Tentang Renja SKPD

NO	URAIAN KEGIATAN	SEHARUSNYA	REALITA	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1.	Penyiapan dan Penetapan PERKADA	Dokumen RKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Renja SKPD maupun kelanjutannya dalam proses penyusunan APBD.	Dokumen RKPD tidak disampaikan kepada SKPD.	
2.	Penyiapan dan Penetapan PERKA SKPD	Renja SKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RKA-SKPD, maka Renja SKPD perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.	Dokumen Renja SKPD tidak disusun SKPD.	

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

Tabel 4.13. Analisis Kinerja Bappeda Pada Tahap Pengintegrasian RKPD kedalam Proses Penganggaran Daerah

NO	URAIAN KEGIATAN	SEHARUSNYA	REALITA	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang dalam penyusunannya dibantu oleh TAPD. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.	Rancangan KUA dan PPAS masih belum final, karena terjadi perubahan dan mengikuti serta menyesuaikan RKA-SKPD, terjadi keterlambatan penyusunan KUA dan PPAS pada minggu pertama Desember.	Kinerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahap Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah adalah rendah, karena terjadinya keterlambatan penyusunan KUA dan PPAS dari jadwal sesuai aturan yang ditetapkan

1	2	3	4	5
2.	Penyusunan RKA-SKPD	RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	RKA-SKPD sudah memuat data rencana Pendapatan, Belanja dan Kegiatan, terjadi keterlambatan penyusunan RKA-SKPD pada minggu pertama Januari.	
3.	Penyusunan RAPBD	Penyusunan RAPBD merupakan tahap akhir dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang disusun bersama TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD sebagai bahan pembahasan paripurna DPRD untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.	Masih terlambatnya pengesahan APBD, dikarenakan adanya penyesuaian di saat pembahasan bersama TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, sehingga proses penganggaran tidak mengikuti/mempedomani hasil perencanaan yang telah disusun, terjadi keterlambatan penyusunan RAPBD pada minggu pertama Maret.	

Sumber : PP No.8 Tahun 2008, hasil analisis 2011.

PEMANDU WAWANCARA
EVALUASI KINERJA BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PADA PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
OLEH : FIHASRIN

I. INDIKATOR RESPONSIVITAS.

1. Apakah pada saat pelaksanaan Musrenbang masyarakat memiliki keterlibatan atau partisipasi yang cukup baik?

II. INDIKATOR RESPONSIBILITAS.

1. Apakah pada tahap persiapan penyusunan RKPD terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang menyangkut dengan prioritas kebutuhan masyarakat?
2. Apakah saat penyusunan rencana awal juga membahas usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu?
3. Renja yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan dari organisasi?
4. Rancangan RKPD yang dibuat sudah sesuai dengan prioritas dari kepentingan umum?
5. Apakah pelaksanaan Musrenbang pada masing-masing tingkatan selama ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?
6. Apakah dalam menyusun Rancangan Akhir RKPD sudah terlaksana sesuai jadwal?

7. Apa yang akan dilakukan SKPD jika BAPPEDA tidak menyampaikan hasil rancangan akhir RKPD?
8. Benarkah BAPPEDA tidak menyampaikan hasil Dokumen RKPD yang telah ditetapkan melalui SK Peraturan Kepala Daerah kepada SKPD?
9. Apakah sering terjadi keterlambatan penyusunan KUA dan PPAS?

III. INDIKATOR AKUNTABILITAS.

1. Apakah dalam penyusunan RKPD, BAPPEDA memiliki skala prioritas yang harus didahulukan?
2. Apakah data-data yang disajikan BAPPEDA memberi kemudahan dalam menyusun rencana awal RKPD?
3. Apakah SKPD melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dalam penyusunan Renja SKPD?
4. Apakah BAPPEDA memberikan kemudahan dan kejelasan informasi guna penyusunan perencanaan?
5. Apakah BAPPEDA memberikan kejelasan terhadap sasaran kebijakan yang telah disusun?
6. Apakah BAPPEDA menyampaikan hasil Rancangan Akhir RKPD kepada SKPD?
7. Bagaimanakah kaitannya dengan kebijakan yang telah dibuat pada RKPD?
8. Apakah SK Kepala SKPD tentang Renja SKPD akan ditetapkan sehubungan dengan tidak dibuatnya Renja SKPD?
9. Apakah program kerja dapat terlaksana dengan baik jika KUA dan PPAS tidak terlaksana tepat waktu?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Senin / 10 Oktober 2011 (jam 15.31 WIB)
 Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam
 Subyek Penelitian/Inisial : 01/Tn.Fjr
 Tempat : Ruang Kepala
 Karakteristik Narasumber : Pimpinan.
 Keterangan : **P** = Pewawancara, **N** = Narasumber

ISI WAWANCARA

- P** = Apakah pada tahap persiapan penyusunan RKPD terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang menyangkut dengan prioritas kebutuhan masyarakat?
- N** = *Ya..tentu saja sebelum kita melakukan penyusunan RKPD terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data terkait dengan kebutuhan masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan..karena RKPD ini merupakan rencana tahunan maka dalam penyusunan harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya.*
- P** = Apakah dalam penyusunan RKPD, BAPPEDA memiliki skala prioritas yang harus didahulukan?
- N** = *Ya..itulah gunanya informasi dan data yang kita kumpulkan itu sebelum melakukan penyusunan RKPD, kita ingin mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendesak dari masyarakat sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan, infrastruktur dapat lebih baik lagi. Percuma dong otonomi daerah jika kita tidak memperhatikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.*
- P** = Apakah saat penyusunan rencana awal juga membahas usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu?
- N** = *Ya..kita kembali mereview kegiatan tahun lalu yang belum terlaksana untuk dapat direalisasikan secepatnya pada tahun berkenaan.*
- P** = Apakah data-data yang disajikan BAPPEDA memberi kemudahan dalam menyusun rencana awal RKPD.

- N** = *BAPPEDA akan sangat membantu dalam hal penyediaan data..biasanya data juga ditunjang oleh data yang diperoleh langsung dari BPS, ataupun melalui observasi lapangan, sehingga akurasi data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan issue yang berkembang saat berkenaan.*
- P** = *Renja yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan dari organisasi?*
- N** = *Ditinjau dari rancangan RKPD yang akan dibuat harus sesuai dengan prinsip dan kebijakan dari organisasi, dimana BAPPEDA sebagai selaku lembaga yang melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplikasi perencanaan pembangunan dan penilaian/evaluasi atas pelaksanaannya di daerah perlu menyesuaikan dengan prinsip kebijakan dari organisasi.*
- P** = *Apakah SKPD melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dalam penyusunan Renja SKPD?*
- N** = *Koordinasi selalu berusaha untuk dilakukan dalam penetapan Renja SKPD pada rancangan penyusunan RKPD awal saja, mengingat dimana SKPD memerlukan informasi dan data dari BAPPEDA.*
- P** = *Rancangan RKPD yang dibuat sudah sesuai dengan prioritas dari kepentingan umum?*
- N** = *Rancangan RKPD yang dibuat sudah tentu disesuaikan dengan prioritas dari apa yang menjadi kepentingan umum saat ini, yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan daerah, sumber-sumber pembiayaan dan juga pemanfaatan. Untuk itulah kami selalu berkoordinasi dengan DPRD khususnya pada lini anggaran untuk dapat merelasisasikan kebijakan yang ada sesuai dengan anggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan.*
- P** = *Apakah BAPPEDA memberikan kemudahan dan kejelasan informasi guna penyusunan perencanaan?*
- N** = *Ya..informasi akan diberikan guna mendukung pelaksanaan berbagai program kegiatan.*
- P** = *Apakah pada saat pelaksanaan Musrenbang masyarakat memiliki keterlibatan atau partisipasi yang cukup baik?*

- N** = *Sejauh ini kita belum secara kontiniu melibatkan partisipasi dari masyarakat ataupun pemangku kepentingan,.kita berusaha melaksanakan Musrenbang ini sesuai dengan PP No 8 tahun 2008 itu tadi..*
- P** = Apakah pelaksanaan Musrenbang pada masing-masing tingkatan selama ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?
- N** = *Hmmm...saya rasa belum ya..belum optimal..*
- P** = Apakah BAPPEDA memberikan kejelasan terhadap sasaran kebijakan yang telah disusun?
- N** = *Ya..kami memberikan kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah disusun.*
- P** = Apakah dalam menyusun Rancangan Akhir RKPD sudah terlaksana sesuai jadwal?
- N** = *Penyusunan rancangan akhir belum terlaksana sesuai jadwal..jadwal yang ditetapkan harus diselesaikan pada minggu pertama bulan Juni, namun terkadang rancangan baru selesai pada akhir September.*
- P** = Apakah BAPPEDA menyampaikan hasil Rancangan Akhir RKPD kepada SKPD?
- N** = *Penyempurnaan dari rancangan akhir RKPD ini biasanya jarang kami sampaikan ke SKPD..karena mengingat ini hanya sekedar penyempurnaan saja..toh pembahasan dari musrenbang sudah lebih dari cukup untuk mengetahui perkembangan tentang rancangan RKPD.*
- P** = Apa yang akan dilakukan SKPD jika BAPPEDA tidak menyampaikan hasil rancangan akhir RKPD?
- N** = *Biasanya SKPD tidak menyusun Renja SKPD, hal ini diketahui dari SKPD tidak menyampaikan Renja kepada BAPPEDA.*
- P** = Benarkah BAPPEDA tidak menyampaikan hasil Dokumen RKPD yang telah ditetapkan melalui SK Peraturan Kepala Daerah kepada SKPD?
- N** = *Dokumen RKPD memang tidak disampaikan kepada SKPD, hal ini sebenarnya menurut kami sudah tidak perlu lagi disampaikan karena kita sudah memiliki rancangan persiapan, rancangan awal dan juga sudah ada musrenbang. Dari pembahasan di musrenbang sudah diketahui keputusan*

final dari RKPD. Sehingga dari hasil tersebut kami menganggap SKPD sudah bisa membuat Renja tanpa menunggu dokumen akhir dari RKPD.

P = Apakah SK Kepala SKPD tentang Renja SKPD akan ditetapkan sehubungan dengan tidak dibuatnya Renja SKPD?

N = *Ya tentu tidak..*

P = Apakah sering terjadi keterlambatan penyusunan KUA dan PPAS?

N = *Kita sudah berusaha maksimal membuat KUA dan PPAS..tapi jika terjadi keterlambatan menurut saya itu bukan hal yang disengaja, karena prosedur yang harus dijalani membuat kami demikian.*

P = Apakah program kerja dapat terlaksana dengan baik jika KUA dan PPAS tidak terlaksana tepat waktu?

N = *Siapa bilang tidak tepat waktu..mungkin hanya pelaporannya saja..tapi pelaksanaan dilapangan sudah berjalan..*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Rabu / 05 Oktober 2011 (jam 16.18 WIB)
 Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam
 Subyek Penelitian/Inisial : 02/Tn.Syf
 Tempat : Ruang Kepala Bidang.
 Karakteristik Narasumber : Kepala Bidang.
 Keterangan : **P** = Pewawancara, **N** = Narasumber

ISI WAWANCARA

- P** = Apakah pada tahap persiapan penyusunan RKPD terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang menyangkut dengan prioritas kebutuhan masyarakat?
- N** = *Memang benar..sebelum diadakannya penyusunan RKPD, itu biasanya memang dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan yang biasanya melibatkan partisipasi dari masyarakat daerah setempat secara langsung..tapi hal ini jarang dilakukan sehingga data yang diperoleh selama ini hanya berdasarkan hasil pengumpulan data dari BAPPEDA.*
- P** = Apakah dalam penyusunan RKPD, BAPPEDA memiliki skala prioritas yang harus didahulukan?
- N** = *Pastinya demikian ya..kita harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan yang dianggap urgent untuk direalisasikan..kami selalu berusaha agar infrastruktur atau kebutuhan urgent dari masyarakat dapat terealisasi dengan cepat dan tepat.*
- P** = Apakah saat penyusunan rencana awal juga membahas usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu?
- N** = *Ya..kegiatan tahun lalu yang belum terlaksana ditinjau ulang dan dibahas kembali agar dapat segera dilaksanakan.*
- P** = Apakah data-data yang disajikan BAPPEDA memberi kemudahan dalam menyusun rencana awal RKPD.

- N** = *Data ini tidak selalu diberikan untuk menunjang dalam Ya..tentunya data-data yang akurat akan lebih memudahkan dalam menyusun rencana awal RKPD, tetapi terkadang penyusunan rencana awal.*
- P** = Renja yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan dari organisasi?
- N** = *Renja yang dibuat harus sesuai dengan sasaran pembangunan, sedangkan sasaran bidang yang akan dicapai merupakan kontribusi dari sector yang bersangkutan untuk mencapai sasaran umum.*
- P** = Apakah SKPD melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dalam penyusunan Renja SKPD?
- N** = *Ya..itu tentunya koordinasi pasti dilakukan mengingat fungsi BAPPEDA yang juga sebagai koordinator...*
- P** = Rancangan RKPD yang dibuat sudah sesuai dengan prioritas dari kepentingan umum?
- N** = *Menurut saya itu sudah pasti..ya tentunya juga dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.*
- P** = Apakah BAPPEDA memberikan kemudahan dan kejelasan informasi guna penyusunan perencanaan?
- N** = *Pasti..itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab BAPPEDA dalam memberikan informasi dan data-data yang mendukung.*
- P** = Apakah pada saat pelaksanaan Musrenbang masyarakat memiliki keterlibatan atau partisipasi yang cukup baik?
- N** = *Kalau dari kita secara langsung tidak..mungkin dari kelurahan ada partisipasi langsung dari masyarakat ataupun pihak pemangku kepentingan.*
- P** = Apakah pelaksanaan Musrenbang pada masing-masing tingkatan selama ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?
- N** = *Belum..masih banyak kekurangannya..*
- P** = Apakah BAPPEDA memberikan kejelasan terhadap sasaran kebijakan yang telah disusun?
- N** = *Ada..biasanya secara tertulis..*

- P** = Apakah dalam menyusun Rancangan Akhir RKPD sudah terlaksana sesuai jadwal?
- N** = *Tidak terlaksana sesuai jadwal..sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian rancangan akhir RKPD.*
- P** = Apakah BAPPEDA menyampaikan hasil Rancangan Akhir RKPD kepada SKPD?
- N** = *Hhmmm..gimana ya, sepertinya tidak..*
- P** = Bagaimanakah kaitannya dengan kebijakan yang telah dibuat pada RKPD?
- N** = *Tentunya kebijakan atau program tersebut tidak terlaksana dengan optimal, karena bagaimanapun renja ini SKPD ini bersifat definitif.*
- P** = Benarkah BAPPEDA tidak menyampaikan hasil Dokumen RKPD yang telah ditetapkan melalui SK Peraturan Kepala Daerah kepada SKPD?
- N** = *RKPD memang tidak disampaikan kepada SKPD, karena menurut kami tidak perlu lagi disampaikan, sebab kita sudah memiliki rancangan persiapan, rancangan awal dan juga sudah ada musrenbang. Dari pembahasan di musrenbang sudah diketahui keputusan final dari RKPD. Sehingga dari hasil tersebut kami menganggap SKPD sudah bisa membuat Renja tanpa menunggu dokumen akhir dari RKPD.*
- P** = Apakah SK Kepala SKPD tentang Renja SKPD akan ditetapkan sehubungan dengan tidak dibuatnya Renja SKPD?
- N** = *Pastinya SK tentu tidak dapat di tetapkan.*
- P** = Apakah program kerja dapat terlaksana dengan baik jika KUA dan PPAS tidak terlaksana tepat waktu?
- N** = *Ga mungkin..*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Senin / 17 Oktober 2011 (jam 11.10 WIB)
 Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam
 Subyek Penelitian/Inisial : 03/Tn.Sri
 Tempat : Ruang Sekretariat.
 Karakteristik Narasumber : PPTK.
 Keterangan : **P** = Pewawancara, **N** = Narasumber

ISI WAWANCARA

- P** = Apakah pada tahap persiapan penyusunan RKPD terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang menyangkut dengan prioritas kebutuhan masyarakat?
- N** = *Kami sebagai tim pelaksana untuk membantu pelaksanaan unit pelayanan yang telah ditetapkan hanya bisa memberikan sedikit masukan pada penyusunan RKPD tentang kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas saat ini, hal ini dimaksud agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi.*
- P** = Apakah dalam penyusunan RKPD, BAPPEDA memiliki skala prioritas yang harus didahulukan?
- N** = *Ya..harusnya demikian..agar kita sebagai pelaksana dilapangan dapat melaksanakan tugas dengan baik, efektif dan efisien..*
- P** = Apakah saat penyusunan rencana awal juga membahas usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu?
- N** = *Sebenarnya, terkadang jika kegiatan tahun lalu yang belum terlaksana akan ditinjau ulang dan dibahas kembali agar dapat segera dilaksanakan.*
- P** = Apakah data-data yang disajikan BAPPEDA memberi kemudahan dalam menyusun rencana awal RKPD.
- N** = *Ya..tentunya data-data yang akurat akan lebih memudahkan dalam menyusun rencana awal RKPD, tetapi terkadang data ini tidak selalu diberikan untuk menunjang dalam penyusunan rencana awal.*
- P** = Renja yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan dari organisasi?

- N** = *Keberhasilan BAPPEDA selaku lembaga perencana di daerah sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk menggerakkan dukungan dari lingkungan yang terlibat yang juga tentunya sesuai dengan prinsip dan kebijakan dari organisasi.*
- P** = Apakah SKPD melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dalam penyusunan Renja SKPD?
- N** = *Setahu saya ya..janganakan antara BAPPEDA dengan SKPD, setiap lini yang berkaitan selalu berusaha melakukan koordinasi.*
- P** = Rancangan RKPD yang dibuat sudah sesuai dengan prioritas dari kepentingan umum?
- N** = *Umumnya sudah sesuai..tetapi kadang realisasi yang kami laksanakan dilapangan ternyata kalau dilihat bukan menjadi kepentingan yang cukup prioritas.*
- P** = Apakah pelaksanaan Musrenbang pada masing-masing tingkatan selama ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?
- N** = *Kayaknya belum..karena saya melihat daris sisi masih adanya progtram yang sebenarnya bukan menjadi prioritas bagi masyarakat.*
- P** = Apakah BAPPEDA memberikan kejelasan terhadap sasaran kebijakan yang telah disusun?
- N** = *Kadang-kadang ada kadang tidak juga..tapi mungkin saya yang tidak membacanya barang kali ya...hehe*
- P** = Apakah dalam menyusun Rancangan Akhir RKPD sudah terlaksana sesuai jadwal?
- N** = *Sepertinya rancangan akhir RKPD tidak selalu tepat waktu..kurang tau juga ada permasalahan apa sehingga rancangan RKPD akhir sering terlambat penyelesaiannya.*
- P** = Apakah BAPPEDA menyampaikan hasil Rancangan Akhir RKPD kepada SKPD?
- N** = *Harusnya disampaikan..karena ini menyangkut penyempurnaan dari rancangan RKPD awal dan sudah dibahas juga di musrenbang..*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Rabu/ 19 Oktober 2011 (jam 11.25 WIB)
 Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam
 Subyek Penelitian/Inisial : 04/Tn.Asw
 Tempat : Ruang Tamu.
 Karakteristik Narasumber : Anggota DPRD.
 Keterangan : **P** = Pewawancara, **N** = Narasumber

ISI WAWANCARA

- P** = Apakah pada tahap persiapan penyusunan RKPD terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang menyangkut dengan prioritas kebutuhan masyarakat?
- N** = *Hal itu tentu sepenuhnya menjadi hak penuh dari BAPPEDA dalam menetapkan dan menyusun RKPD tahunan..tentang bagaimana atau tahapan apa yang harus dilakukan sebelum melakukan penyusunan RKPD ini, ya tentunya kita berharap penganggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kumpulan dari data dan informasi yang valid.*
- P** = Apakah dalam penyusunan RKPD, BAPPEDA memiliki skala prioritas yang harus didahulukan?
- N** = *Ooo tentu..karena ini berkaitan dengan penggunaan anggaran maka sudah seharusnya dalam penyusunan RKPD berdasarkan skala prioritas.*
- P** = Apakah data-data yang disajikan BAPPEDA memberi kemudahan dalam menyusun rencana awal RKPD.
- N** = *Melalui data yang disajikan secara akurat akan sangat membantu dalam penyusunan rencana awal RKPD, yang nantinya akan berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah tahun bersangkutan.*
- P** = Renja yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan dari organisasi?
- N** = *Dalam Renja yang dibuat harus sesuai dengan sasaran pembangunan, sedangkan sasaran bidang yang akan dicapai merupakan kontribusi dari sektor yang bersangkutan untuk mencapai sasaran umum.*

- P** = Apakah SKPD melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dalam penyusunan Renja SKPD?
- N** = *Melalui data yang disajikan secara akurat akan sangat membantu dalam penyusunan rencana awal RKPD, yang nantinya akan berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah tahun bersangkutan.*
- P** = Rancangan RKPD yang dibuat sudah sesuai dengan prioritas dari kepentingan umum?
- N** = *DPRD hanya perlu menyetujui RKPD yang dibuat sehingga apa yang menjadi kepentingang yang sfatnta urgent bagi masyarakat dapat terlaksana dengan secepatnya..karena hal ini juga menyangkut anggaran jadi ya harus disesuaikanlah..*
- P** = Apakah pada saat pelaksanaan Musrenbang masyarakat memiliki keterlibatan atau partisipasi yang cukup baik?
- N** = *BAPPEDA perlu melakukan optimalisasi terhadap partisipasi dari masyarakat sehingga diharapkan dari partisipasi ini akan memberikan hasil yang optimal dalam membuat rancangan kerja pembangunan daerah.*
- P** = Apakah pelaksanaan Musrenbang pada masing-masing tingkatan selama ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?
- N** = *Hehe..kurang tau saya..tapi menurut pengamatan saya masih perlu banyak perbaikan.*
- P** = Apakah BAPPEDA memberikan kejelasan terhadap sasaran kebijakan yang telah disusun?
- N** = *BAPPEDA setau saya memberikan kejelasan sasaran dari kebijakan yang dibuat, cuma mungkin lambat dari yang di jadwalkan..*
- P** = Apa yang akan dilakukan SKPD jika BAPPEDA tidak menyampaikan hasil rancangan akhir RKPD?
- N** = *Penyempurnaan renja SKPD merupakan tanggung jawab SKPD oleh karena itu menurut saya BAPPEDA harus memberikan hasil rancangan akhir kepada SKPD sehingga SKPD dalam membuat Renja SKPD dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah disusun.*

- P** = Benarkah BAPPEDA tidak menyampaikan hasil Dokumen RKPD yang telah ditetapkan melalui SK Peraturan Kepala Daerah kepada SKPD?
- N** = *BAPPEDA seharusnya menyangkut laporan akhir RKPD harus menyerahkan kepada SKPD, hal ini dimaksud agar SKPD dapat menyusun Renja SKPD tahun berkenaan, walaupun sudah ada rancangn persiapan sampai musrenbang tapi tetap akhir hasil perlu dilaporkan guna mewujudkan kelancaran pada pelaksanaan program kerja.*
- P** = Apakah SK Kepala SKPD tentang Renja SKPD akan ditetapkan sehubungan dengan tidak dibuatnya Renja SKPD?
- N** = *Mana mungkin akan ditetapkan..renja SKPD nya saja tidak ada..gimana toh??*
- P** = Apakah sering terjadi keterlambatan penyusunan KUA dan PPAS?
- N** = *Prosedur memang harus dijalankan, tetapi waktu juga harus dpertimbangkan..agar semuanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Jumat / 07 Oktober 2011 (jam 09.15 WIB)
 Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam
 Subyek Penelitian/Inisial : 05/Tn.Ysl.
 Tempat : Ruang Sekretariat.
 Karakteristik Narasumber : Perencanaan.
 Keterangan : **P** = Pewawancara, **N** = Narasumber

ISI WAWANCARA

- P** = Apakah pada tahap persiapan penyusunan RKPD terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang menyangkut dengan prioritas kebutuhan masyarakat?
- N** = *ya biasanya, sebelum diadakannya penyusunan RKPD, itu biasanya memang dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan data dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat daerah setempat secara langsung. tapi hal ini jarang dilakukan sehingga data yang diperoleh selama ini hanya berdasarkan hasil pengumpulan data dari BAPPEDA.*
- P** = Apakah data-data yang disajikan BAPPEDA memberi kemudahan dalam menyusun rencana awal RKPD.
- N** = *Dalam hal penyediaan data, biasanya data diperoleh langsung dari BPS, ataupun melalui observasi lapangan, sehingga akurasi data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan issue yang berkembang saat pembahasan RKPD.”*
- P** = Apakah pada saat pelaksanaan Musrenbang masyarakat memiliki keterlibatan atau partisipasi yang cukup baik?
- N** = *ya, kelurahan tidak ada partisipasi langsung dan juga dari masyarakat ataupun pihak pemangku kepentingan.”*
- P** = Apakah dalam menyusun Rancangan Akhir RKPD sudah terlaksana sesuai jadwal?
- N** = *dalam rancangan akhir RKPD tidak selalu tepat waktu, ya, banyak permasalahan yang membuat rancangan RKPD akhir sering terlambat.”*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Kamis / 06 Oktober 2011 (jam 10.25 WIB)
 Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam
 Subyek Penelitian/Inisial : 06 / Tn.Hai
 Tempat : Ruang Sekretariat.
 Karakteristik Narasumber : Perencanaan.
 Keterangan : **P** = Pewawancara, **N** = Narasumber

ISI WAWANCARA

- P** = Apakah pada tahap persiapan penyusunan RKPD terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang menyangkut dengan prioritas kebutuhan masyarakat?
- N** = *Benar, sebelum diadakannya penyusunan RKPD, itu biasanya memang dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan data dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat daerah setempat secara langsung. tapi hal ini jarang dilakukan sehingga data yang diperoleh selama ini hanya berdasarkan hasil pengumpulan data dari BAPPEDA.*
- P** = Apakah data-data yang disajikan BAPPEDA memberi kemudahan dalam menyusun rencana awal RKPD.
- N** = *Ya, data-data yang akurat akan lebih memudahkan dalam menyusun rencana awal RKPD, tetapi terkadang data ini tidak selalu diberikan untuk menunjang dalam penyusunan rencana awal.*
- P** = Rancangan RKPD yang dibuat sudah sesuai dengan prioritas dari kepentingan umum?
- N** = *Renja pada umumnya sudah sesuai, tetapi kadang realisasi yang kami laksanakan dilapangan ternyata kalau dilihat bukan menjadi kepentingan yang cukup prioritas.*
- P** = Apakah pada saat pelaksanaan Musrenbang masyarakat memiliki keterlibatan atau partisipasi yang cukup baik?
- N** = *Kalau lihat secara langsung tidak, mungkin dari kelurahan ada partisipasi langsung dari masyarakat ataupun pihak pemangku kepentingan*

- P** = Apakah dalam menyusun Rancangan Akhir RKPD sudah terlaksana sesuai jadwal?
- N** = *ya, dalam rancangan akhir RKPD terkadang tidak tepat waktu, ya, kurang tau juga apa permasalahannya yang membuat rancangan RKPD akhir sering terlambat.”*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Kamis / 20 Oktober 2011 (jam 09.35 WIB)
 Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam
 Subyek Penelitian/Inisial : 07/Tn.Edy
 Tempat : Ruang Sekretariat.
 Karakteristik Narasumber : Perencanaan.
 Keterangan : **P** = Pewawancara, **N** = Narasumber

ISI WAWANCARA

- P** = Apakah saat penyusunan rencana awal juga membahas usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu?
- N** = *Ya, dalam menyusun RKPD yang baru terkadang kegiatan tahun lalu yang belum terlaksana ditinjau ulang selanjutnya dibahas kembali agar dapat segera dilaksanakan.*
- P** = Apakah data-data yang disajikan BAPPEDA memberi kemudahan dalam menyusun rencana awal RKPD.
- N** = *ya, biasanya data diperoleh langsung dari BPS, ataupun melalui observasi lapangan dan juga dari BAPPEDA, sehingga akurasi data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan issue yang berkembang saat pembahasan RKPD.”*
- P** = Renja yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan dari organisasi?
- N** = *ya, yang dibuat dalam Renja harus sesuai dengan sasaran pembangunan, sedangkan sasaran bidang yang akan dicapai merupakan kontribusi dari sektor yang bersangkutan untuk mencapai sasaran umum.*
- P** = Rancangan RKPD yang dibuat sudah sesuai dengan prioritas dari kepentingan umum?
- N** = *RKPD pada umumnya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, tetapi kadang realisasi yang kami laksanakan dilapangan ternyata kalau dilihat bukan menjadi kepentingan yang cukup prioritas.”*
- P** = Apakah pada saat pelaksanaan Musrenbang masyarakat memiliki keterlibatan atau partisipasi yang cukup baik?

N = ya, perlu ada optimalisasi oleh BAPPEDA terhadap partisipasi dari masyarakat sehingga diharapkan dari partisipasi ini akan memberikan hasil yang optimal dalam membuat rancangan kerja pembangunan daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA